BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Millik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Millik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 92);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 27);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
3.1.1. Pendapatan-LRA
3.1.2. Belanja
3.1.3. Aset
3.1.4. Kewajiban
3.1.5. Ekuitas
3.1.6. Pendapatan-LO
3.1.7. Beban
3.1.8. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab V. Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BPKA

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
BELANJA DAERAH	**1.584.691.790.385,00**	**1.537.025.735.371,82**	**96,99**	**47.666.055.013,18**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**102.342.924.899,00**	**95.615.087.222,00**	**93,43**	**6.727.837.677,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.998.000,00	3.998.000,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	3.999.900,00	3.936.972,00	98,43	62.928,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.700,00	1.909.700,00	95,50	90.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86.771.014.179,00	80.602.573.785,00	92,89	6.168.440.394,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.840.000,00	5.840.000,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800,00	4.617.700,00	92,36	382.100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.999.700,00	2.995.750,00	99,87	3.950,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.215.000,00	7.596.250,00	92,47	618.750,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	71.413.000,00	70.029.122,00	98,06	1.383.878,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.306.500,00	194.023.705,00	94,05	12.282.795,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.444.500,00	54.343.586,00	96,28	2.100.914,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.022.000,00	22.937.000,00	95,48	1.085.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.976.200,00	76.782.950,00	98,47	1.193.250,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.006.000,00	10.216.700,00	72,95	3.789.300,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	494.604.000,00	491.679.618,00	99,41	2.924.382,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	85.872.600,00	68.596.100,00	79,88	17.276.500,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	474.002.000,00	465.460.146,00	98,20	8.541.854,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.498.000,00	345.948.810,00	99,27	2.549.190,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.876.000,00	11.191.230,00	94,23	684.770,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.103.533.300,00	3.744.612.768,00	91,25	358.920.532,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.982.100,00	367.184.327,00	96,38	13.797.773,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.532.408.000,00	5.511.878.672,00	99,63	20.529.328,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Nilai	10.811.000,00	4.546.500,00	42,05	6.264.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.046.236.220,00	973.773.922,00	93,07	72.462.298,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.290.941.200,00	1.276.396.441,00	98,87	14.544.759,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	516.000.000,00	512.231.353,00	99,27	3.768.647,00

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	788.226.000,00	774.086.115,00	98,21	14.139.885,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**1.473.409.799.686,00**	**1.433.133.487.139,82**	**97,27**	**40.276.312.546,18**
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	41.351.950,00	28.470.599,00	68,85	12.881.351,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	39.172.800,00	30.099.955,00	76,84	9.072.845,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	298.766.000,00	295.085.000,00	98,77	3.681.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	400.383.750,00	331.061.957,00	82,69	69.321.793,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	88.875.000,00	59.705.367,00	67,18	29.169.633,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	77.500.000,00	2.175.000,00	2,81	75.325.000,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	3.074.000,00	3.074.000,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	20.610.000,00	20.610.000,00	100,00	-
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas sena Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	36.104.000,00	32.882.000,00	91,08	3.222.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8.723.700,00	7.323.700,00	83,95	1.400.000,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20.926.500,00	20.563.000,00	98,26	363.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	54.202.800,00	45.932.250,00	84,74	8.270.550,00
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.694.900,00	3.694.900,00	100,00	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4.753.000,00	4.753.000,00	100,00	-

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	53.306.000,00	53.306.000,00	100,00	-
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	7.386.000,00	6.711.000,00	90,86	675.000,00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	21.996.000,00	21.996.000,00	100,00	-
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	736.640.000,00	717.668.450,00	97,42	18.971.550,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	578.024.757.610,00	561.053.968.452,82	97,06	16.970.789.157,18
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12.443.010.243,00	20.000.000,00	0,16	12.423.010.243,00
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	881.009.565.433,00	870.359.406.509,00	98,79	10.650.158.924,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**2.316.501.500,00**	**2.148.376.867,00**	**92,74**	**168.124.633,00**
Penyusunan Standar Harga	301.710.000,00	299.139.500,00	99,15	2.570.500,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	54.049.600,00	53.468.450,00	98,92	581.150,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	290.449.000,00	275.531.430,00	94,86	14.917.570,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	1.120.650.200,00	982.772.637,00	87,70	137.877.563,00
Penilaian Barang Milik Daerah	210.799.700,00	209.057.900,00	99,17	1.741.800,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	338.843.000,00	328.406.950,00	96,92	10.436.050,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**6.622.564.300,00**	**6.128.784.143,00**	**92,54**	**493.780.157,00**
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	3.237.078.400,00	2.984.688.450,00	92,20	252.389.950,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	13.698.100,00	13.588.550,00	99,20	109.550,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	57.300.050,00	56.555.000,00	98,70	745.050,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	961.223.050,00	946.453.704,00	98,46	14.769.346,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.320.264.750,00	2.094.638.489,00	90,28	225.626.261,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.000.000,00	31.860.000,00	99,56	140.000,00
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	999.950,00	999.950,00	100,00	-

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pendapatan Daerah BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 5.825.466.993.017,00 dan direalisasikan sebesar Rp 5.930.987.939.720,85 atau 101,81%. Belanja Daerah BPKA dianggarkan sebesar Rp 1.584.691.790.385,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.537.025.735.371,82 atau 96,99%.

Secara umum target pendapatan dan kinerja dapat dicapai dengan baik dan tidak ada kendala yang material dihadapi oleh BPKA.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BPKA

3.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan BPKA

		2024	2023 *(audited)*
3.1.1.	**Pendapatan Daerah**	**Rp 5.930.987.939.720,85**	**Rp 5.752.478.035.985,65**

Pendapatan Daerah BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 5.825.466.993.017,00 dan direalisasikan sebesar Rp 5.930.987.939.720,85 atau 101,81% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 178.509.903.735,20 atau 3,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.752.478.035.985,65 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**Rp 2.387.424.334.018,85**	**Rp 2.280.596.201.146,65**

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 2.268.419.049.774,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2.387.424.334.018,85 atau 105,25% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 106.828.132.872,20 atau 4,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.280.596.201.146,65 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1.1.	**Pajak Daerah**	**Rp 2.157.532.293.945,00**	**Rp 2.069.612.267.000,57**

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 2.059.869.703.526,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2.157.532.293.945,00 atau 104,74% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 87.920.026.944,43 atau 4,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.069.612.267.000,57dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PAJAK DAERAH				
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	982.285.000.000,00	1.041.662.985.900,00	106,04	978.969.042.100,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	423.799.000.000,00	453.957.069.400,00	107,12	440.843.761.300,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	350.000.000.000,00	372.113.724.291,00	106,32	369.593.604.698,57
Pajak Air Permukaan	547.327.500,00	806.104.996,00	147,28	612.386.532,00
Pajak Rokok	303.208.376.026,00	288.962.709.258,00	95,30	279.593.472.370,00
Pajak Alat Berat	30.000.000,00	29.700.100,00	99,00	-
JUMLAH (Rp)	**2.059.869.703.526,00**	**2.157.532.293.945,00**	**104,74**	**2.069.612.267.000,57**

Pajak Alat Berat merupakan jenis pajak baru yang diakui oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai Tahun Anggaran 2024. Namun, target pendapatan Pajak Alat Berat tidak tercapai karena Permendagri yang mengatur tentang NJKB dan NJAB tahun 2024 diundangkan pada bulan Agustus sehingga pendaftaran dan penetapan alat berat baru mulai dilakukan pada bulan November 2024.

Tabel III.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	43.665.337.400,00	38.683.847.600,00	88,59	39.704.701.650,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	67.502.834.300,00	69.952.909.100,00	103,63	65.510.298.800,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	470.999.941.800,00	513.718.294.350,00	109,07	475.852.304.800,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	5.572.400.200,00	6.652.048.100,00	119,37	5.681.994.100,00
PKB-Mobil Bus-Bus	1.410.093.800,00	1.377.016.500,00	97,65	1.223.054.700,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	52.005.150.400,00	53.412.613.150,00	102,71	50.975.861.100,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	42.518.518.600,00	43.615.068.500,00	102,58	42.649.492.600,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	298.610.723.500,00	314.251.188.600,00	105,24	297.371.334.350,00
JUMLAH (Rp)	**982.285.000.000,00**	**1.041.662.985.900,00**	**106,04**	**978.969.042.100,00**

Tabel III.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	6.690.545.100,00	6.037.989.000,00	90,25	6.071.861.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	30.140.412.400,00	27.524.065.000,00	91,32	25.684.114.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	193.707.778.800,00	219.318.554.600,00	113,22	212.943.390.900,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	2.492.983.800,00	6.545.601.300,00	262,56	3.728.493.300,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	735.836.400,00	2.138.120.000,00	290,57	828.263.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	19.734.422.300,00	17.769.035.900,00	90,04	16.875.121.400,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	11.604.095.600,00	12.003.918.600,00	103,45	11.341.168.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	158.692.925.600,00	162.619.785.000,00	102,47	163.371.349.700,00
JUMLAH (Rp)	**423.799.000.000,00**	**453.957.069.400,00**	**107,12**	**440.843.761.300,00**

Jumlah Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 2.011.165 unit untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan 156.394 unit untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Wajib pungut untuk Pajak Bahan Bakar adalah Pertamina Patra Niaga, PT AKR Corporindo, Exon Mobile, PT Petroline Niaga Energi, PT Elnusa Petrofine, dan PT Energi Hijau Samoedra Bersaudara.

Tabel III.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	294.294.000.000,00	311.123.801.824,00	105,72	307.900.130.507,86
PBBKB-Bahan Bakar Solar	55.706.000.000,00	60.989.922.467,00	109,49	61.693.474.190,71
JUMLAH (Rp)	**350.000.000.000,00**	**372.113.724.291,00**	**106,32**	**369.593.604.698,57**

- PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp 311.123.801.824,00 merupakan pendapatan pajak bahan bakar bensin Pertalite sebesar Rp 235.735.099.621,00; Pertamax sebesar Rp 72.992.987.265,00; dan Pertamax Turbo sebesar Rp 2.395.714.938,00
- PBBKB-Bahan Bakar Solar sebesar Rp 60.989.922.467,00 merupakan pendapatan pajak bahan bakar Solar sebesar Rp 9.804,00; Dexlite sebesar Rp 3.907.558.736,00; Bio Solar sebesar Rp 53.330.771.243,00; dan Pertamina Dex sebesar Rp 3.751.582.684,00.

Tabel III.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Air Permukaan (PAP)

URAIAN	2024		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pajak Air Permukaan			
KPPD Bantul	199.200.000,00	298.532.384,00	149,87
KPPD Kulon Progo	122.000.000,00	212.193.471,00	173,93
KPPD Gunungkidul	76.127.500,00	133.628.337,00	175,53
KPPD Sleman	150.000.000,00	161.750.804,00	107,83
JUMLAH (Rp)	**547.327.500,00**	**806.104.996,00**	**147,28**

3.1.1.1.2. Retribusi Daerah **Rp 1.030.316.927,00** **Rp 891.949.811,00**

Retribusi Daerah BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 895.195.700,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.030.316.927,00 atau 115,09% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 138.367.116,00 atau 15,51% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 891.949.811,00.

Tabel III.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
RETRIBUSI DAERAH				
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	463.734.086,00
Retribusi Penyewaan Tanah	-	-	-	140.600.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	-	-	-	287.615.725,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	149.240.000,00	150.740.000,00	101,01	-
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	745.955.700,00	879.576.927,00	117,91	-
JUMLAH (Rp)	**895.195.700,00**	**1.030.316.927,00**	**115,09**	**891.949.811,00**

- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dipergunakan untuk pemakaian ruangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk fotokopi sebesar Rp 84.980.000,00 dan kantin sebesar Rp 65.760.000,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipergunakan untuk Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan oleh BPKA (Induk) berupa sewa rumah dinas sebesar Rp 203.502.541,00 dan penggunaan tanah dan bangunan sebesar Rp 347.014.386,00. Selain itu, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah juga dipergunakan untuk pemakaian ruangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lahan parkir sebesar Rp 145.920.000,00; ATM sebesar Rp 47.250.000,00; workshop TNKB sebesar Rp 77.040.000,00; ruangan display kendaraan sebesar Rp 12.550.000,00; kantor kas sebesar Rp 32.100.000,00; serta ruangan display jasa raharja sebesar Rp 14.200.000,00.

3.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **Rp 120.935.677.671,93** **Rp 109.790.680.460,56**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 121.749.510.238,00 dan direalisasikan sebesar Rp 120.935.677.671,93 atau 99,33% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 11.144.997.211,37 atau 10,15% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 109.790.680.460,56. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan BPKA meliputi rincian sebagai berikut:

Tabel III.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	-	209.497.429,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	115.449.554.309,00	115.608.956.981,93	100,14	103.220.503.521,56
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	6.299.955.929,00	5.326.720.690,00	84,55	6.360.679.510,00
JUMLAH (Rp)	**121.749.510.238,00**	**120.935.677.671,93**	**99,33**	**109.790.680.460,56**

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) merupakan pembayaran dividen atas penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp 111.028.716.629,00 dan Badan Usaha Kredit Perdesaan sebesar Rp 4.580.240.352,93
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) merupakan pembayaran dividen atas penyertaan modal kepada PT. Taru Martani sebesar Rp 4.469.464.798,00 dan PT. Anindya Mitra Internasional sebesar Rp 857.255.892,00.

3.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah **Rp 107.926.045.474,92** **Rp 100.301.303.874,52**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 85.904.640.310,00 dan direalisasikan sebesar Rp 107.926.045.474,92 atau 125,63% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 7.624.741.600,40 atau 7,60% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 100.301.303.874,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH				
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.770.000.000,00	3.117.851.516,00	112,56	3.893.817.148,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.785.271.000,00	12.374.082.042,00	114,73	11.742.300.000,00

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
Jasa Giro	8.170.759.412,00	7.953.419.673,00	97,34	5.917.546.866,77
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	11.540.000,00	0,00	-
Pendapatan Bunga	10.000.000.000,00	16.371.213.210,00	163,71	18.904.579.186,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	900.000,00	0,00	8.000.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-	0,00	51.540,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	735.407.168,00	0,00	821.835.137,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.582.434.500,00	61.431.097.950,00	121,45	54.432.302.350,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	28.808.740,00	36.388.533,00	126,31	42.859.740,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	0,00	182.984.070,00
Pendapatan dari Pengembalian	3.567.366.658,00	5.894.145.382,92	165,22	4.284.027.836,75
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	0,00	71.000.000,00
TOTAL (Rp)	**85.904.640.310,00**	**107.926.045.474,92**	**125,63**	**100.301.303.874,52**

- **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

  Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar sebesar Rp 2.770.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.117.851.516,00 atau 112,56% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 775.965.632,00) atau (19,93%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 3.893.817.148,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN				
Hasil Penjualan Tanah	-	25.000.000,00	-	-
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.535.000.000,00	2.645.996.016,00	104,38	584.945.979,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	210.000.000,00	195.750.000,00	93,21	2.330.982.569,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	251.105.500,00	1.004,42	366.636.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	611.252.600,00
JUMLAH (Rp)	**2.770.000.000,00**	**3.117.851.516,00**	**112,56**	**3.893.817.148,00**

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 358.500.000,00
- Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional sebanyak Roda Empat sebesar Rp 110.409.216,00
- Penjualan Barang Milik Daerah berupa Tebangan Pohon dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan dan Paket Pelebaran Jalan menuju Standar Brosot-Toyan sebesar Rp 11.600.000,00
- Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 568.000.000,00
- Penjualan berupa Kendaraan Bus sebanyak 16 Unit sebesar Rp 754.668.000,00

- Penjualan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPPTG) Unit Fasilitasi Kemasan yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto KM 8,5 Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab Sleman D.I. Yogyakarta sebesar Rp 58.250.000,00
- Penjualan berupa Kendaraan Bus sebanyak 9 Unit sebesar Rp 664.710.000,00
- Penjualan berupa 33 (tiga puluh tiga) unit Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Segmen Ngremang-Garongan sebesar Rp 68.000.000,00
- Penjualan berupa: 1) Bangunan Gedung Kantor Permanen (eks Gedung UPTD BPTTG Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; 2) Bangunan Gedung Kantor (eks UPT Kulit-Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY) sebesar Rp 12.500.000,00
- Penjualan berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemda DIY sebesar Rp 37.000.000,00
- Penjualan berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 77.000.000,00
- Penjualan berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah sebesar Rp 16.300.000,00
- Penjualan berupa Gedung dan Bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di Komplek Taman Hutan Raya Bunder, Playen, Gunungkidul sebesar Rp 20.000.000,00
- Penjualan berupa Hewan Ternak Sapi pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan, dengan rincian : 1) Sapi Perah sebanyak 4 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY; 2) Sapi Bull sebanyak 2 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY 3) Sapi Potong sebanyak 3 ekor, berlokasi di Ngentak, Sumberagung, Kec. Jetis, Kabupaten Bantul sebesar Rp 177.755.500,00
- Penjualan berupa 25 Ekor Hewan Ternak Kambing/Domba pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebesar Rp 27.450.000,00
- Pemusnahan BMD berupa Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran, dan Aset Tak Berwujud berupa Kajian sebesar Rp 51.708.800,00
- Penjualan BMD berupa Peralatan Mesin dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 61.000.000,00
- Penjualan BMD berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon pada Unit Produksi Tambak UPTD BP3MBTP, RS Jiwa Grhasia, TPA Piyungan dan JJLS Segmen Ngremang-Garongan sebesar Rp 18.000.000,00
- Penjualan BMD berupa Sisa Tanah Galian pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah sebesar Rp 25.000.000,00

- **Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

  Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Sewa BMD yang dianggarkan sebesar Rp 10.785.271.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 12.374.082.042,00 atau 114,73% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 631.782.042,00 atau 5,38% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 11.742.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN				
Hasil Sewa BMD	5.572.435.000,00	6.221.971.000,00	111,66	11.742.300.000,00
Hasil Guna Serah	5.212.836.000,00	6.152.111.042,00	118,02	-
JUMLAH (Rp)	**10.785.271.000,00**	**12.374.082.042,00**	**114,73**	**11.742.300.000,00**

Hasil Sewa BMD sebesar Rp 12.374.082.042,00 merupakan Hasil Sewa BMD dan Hasil Guna Serah dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa tanah dan bangunan di Komplek Colombo atas nama Aswin Kumala Darma Saputra sebesar Rp 45.100.000,00
- Sewa tanah dan bangunan oleh Badan Anti Korupsi sebesar Rp 12.075.000,000
- Sewa tanah dan bangunan oleh BUKP Gondokusuman sebesar Rp 51.000.000,00
- Sewa rumah patehan atas nama Hermawan sebesar Rp 3.500.000,00
- Sewa tanah di Kulon Progo oleh Kelompok Tani Tirto Manunggal sebesar Rp 25.000.000,00
- Sewa eks PPK Kulon Progo oleh Koperasi Angkasa Pura I Avia sebesar Rp 51.200.000,00
- Sewa tanah dan bangunan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sumber Rejeki sebesar Rp 7.332.000,00
- Sewa tanah dan bangunan untuk Pasar Piyungan oleh Pemkab Bantul sebesar Rp 17.970.000,00
- Sewa tanah dan bangunan oleh PT. Anindya Mitra Internasional sebesar Rp 695.070.000,00
- Sewa tanah dan bangunan oleh PT. Selo Adikarto sebesar Rp 249.000.000,00
- Sewa tanah dan bangunan di Jl. Malioboro oleh PT. Setia Mataram Tritunggal sebesar Rp 6.152.111.042,00
- Sewa tanah dan bangunan untuk Jogja Expo Center oleh PT Surya Abhinaya Sentosa sebesar Rp 4.533.770.000,00
- Sewa BMD di Jl. Taman Siswa oleh PT. Yudhistira Mahadana Sampurna sebesar Rp 190.000.000,00
- Sewa tanah oleh PT. Formula Land sebesar Rp 124.000.000,00
- Sewa tanah oleh Purwanti Koperasi Kasongan Usaha Bersama sebesar Rp 10.000.000,00
- Sewa tanah oleh Republik Altarria sebesar Rp 10.000.000,00
- Sewa tanah dan bangunan atas nama Romi Sukma sebesar Rp 9.500.000,00
- Sewa tanah dan bangunan atas nama Muhyudi Prabowo sebesar Rp 8.250.000,00
- Sewa rumah patehan atas nama Tien Setiantoro sebesar Rp 14.000.000,00
- Sewa tanah atas nama Yani Suryani dan Juju sebesar Rp 10.000.000,00
- Sewa BMD di Giwangan atas nama Yayasan Angga Binangun sebesar Rp 67.704.000,00

- **Jasa Giro**

  Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp 8.170.759.412,00 dan direalisasikan sebesar Rp 7.953.419.673,00 atau 97,34% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.035.872.806,23 atau 34,40% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 5.917.546.866,77. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Giro

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
JASA GIRO				
Jasa Giro pada Kas Daerah	8.000.000.000,00	7.429.210.323,00	92,87	5.388.709.174,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	170.019.738,00	523.469.676,00	307,89	428.572.186,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	739.674,00	739.674,00	100,00	100.265.506,77
JUMLAH (Rp)	**8.170.759.412,00**	**7.953.419.673,00**	**97,34**	**5.917.546.866,77**

Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp 7.429.210.323,00 merupakan pendapatan yang diterima dari penempatan kas daerah di PT. Bank BPD DIY selama Tahun Anggaran 2024. Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp 523.469.676,00 merupakan pendapatan yang diterima dari penempatan kas yang ada di rekening bendahara dan PPTK selama Tahun Anggaran 2024. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebesar Rp 739.674,00 merupakan setoran pengembalian sisa saldo tutup rekening pada SMA dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- **Pendapatan Bunga**

  Pendapatan Bunga dianggarkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 16.371.213.210,00 atau 163,71% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 2.533.365.976,00) atau (13,40%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 18.904.579.186,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN BUNGA				
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	16.371.213.210,00	163,71	18.904.579.186,00
JUMLAH (Rp)	**10.000.000.000,00**	**16.371.213.210,00**	**163,71**	**18.904.579.186,00**

Pendapatan Bunga BPKA Tahun sebesar Rp 16.067.522.830,00 berasal dari penempatan rekening deposito pada PT. Bank BPD DIY. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (halaman 206-208) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. Pendapatan Bunga sebesar Rp 303.690.380,00 merupakan remunerasi atas saldo Treasury Deposit Facility (TDF).

- **Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

  Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah direalisasikan sebesar Rp 900.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 7.100.000,00) atau (88,75%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 8.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan
atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN				
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	900.000,00	-	8.000.000,00
JUMLAH (Rp)	**-**	**900.000,00**	**-**	**8.000.000,00**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 900.000,00 merupakan penerimaan setoran pengembalian kerugian daerah atas nama Sudjono dari PD. Pertambangan.

- **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

  Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dianggarkan namun terdapat realisasi sebesar Rp 735.407.168,00 sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 86.427.969,00) atau (10,52%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 821.835.137,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda
atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN				
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	735.407.168,00	-	821.835.137,00
JUMLAH (Rp)	**-**	735.407.168,00	**-**	**821.835.137,00**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan denda yang diakui oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari berbagai macam sektor dengan rincian sebagai berikut:

- Keterlambatan pekerjaan Balai Dikmen Kota Yogyakarta di SMA Negeri 9 Yogyakarta sebesar Rp 3.142.556,00
- Keterlambatan pekerjaan pemeliharaan gedung dari Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran sebesar Rp 5.338.876,00
- Keterlambatan pelaksanaan jasa konstruksi Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp 3.260.676,00
- Keterlambatan pengadaan rompi oleh CV Surya Putri sebesar Rp 13.220.771,00
- Keterlambatan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp 38.187.000,00 atas pekerjaan pengeboran air tanah dan sumur resapan Kelurahan Rejosari, pekerjaan saluran irigasi di Tirtorejo, dan pekerjaan konstruksi lainnya
- Keterlambatan pekerjaan rehabilitasi Joglo Panembahan bulan November 2024 oleh Dinas Kebudayaan sebesar Rp 10.385.311,00

- Keterlambatan pekerjaan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 18.280.930,00 atas pekerjaan di SMA Negeri 1 Bantul, kantin sekolah SLB Ponjong, gedung SLB Negeri 2 Yogyakarta, dan rehabilitasi ruang kelas sekolah
- Keterlambatan pekerjaan oleh Dinas Kesehatan atas pengadaan euroimun antri rubella virus sebesar Rp 987.224,00 dan pengadaan reagen HIV sebesar Rp 44.538,00
- Keterlambatan pekerjaan rehabilitasi gedung PLUT oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 46.349.563,00
- Keterlambatan pekerjaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atas bangunan gedung konservasi di Samas sebesar Rp 8.777.390,00 dan konstruksi di kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng sebesar Rp 25.993.862,00
- Keterlambatan pekerjaan pembangunan revitalisasi gedung sarana produksi CFSMI kulit manding oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 12.967.749,00
- Keterlambatan pekerjaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pekerjaan kandang rusa Tahura Bundar sebesar Rp 1.183.000,00
- Keterlambatan pekerjaan CV. Ariesta di Kalurahan Glagah sebesar Rp 1.901.824,00
- Keterlambatan pekerjaan oleh Dinas Perhubungan atas pengadaan bus listrik dengan PT. Mobil Anak Bangsa sebesar Rp 327.770.270,00
- Keterlambatan pekerjaan oleh RS Jiwa Grhasia atas pengadaan perlengkapan baju kerja sebesar Rp 114.209,00; pengadaan alat inkubator sebesar Rp 1.755.000,00; dan pembangunan gedung IGD baru sebesar Rp 178.888.457,00
- Keterlambatan pekerjaan SMK Negeri 2 Wonosari atas pengiriman sarana pendukung tenaga keamanan sebesar Rp 2.802.000,00
- Keterlambatan pekerjaan lainnya sebesar Rp 34.055.962,00

- **Pendapatan Denda Pajak Daerah**

  Pendapatan Denda Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp 50.582.434.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp 61.431.097.950,00 atau 121,45% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 6.998.795.600,00 atau 12,86% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 54.432.302.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH				
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50.000.000.000,00	60.385.186.350,00	120,77	53.372.068.600,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	582.434.500,00	1.045.911.600,00	179,58	1.060.233.750,00
JUMLAH (Rp)	**50.582.434.500,00**	**61.431.097.950,00**	**121,45**	**54.432.302.350,00**

- **Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

  Pendapatan Denda Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp 28.808.740,00 dan direalisasikan sebesar Rp 36.388.533,00 atau 126,31% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 6.471.207,00) atau (15,10%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 42.859.740,00. Pendapatan Denda Retribusi Daerah bersumber dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha, dimana seluruh pendapatannya berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH				
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha				
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	42.859.740,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	28.808.740,00	36.388.533,00	126,31	
JUMLAH (Rp)	**28.808.740,00**	**36.388.533,00**	**126,31**	**42.859.740,00**

Pendapatan Denda Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari denda retribusi daerah atas sewa rumah dinas sebesar Rp 5.812.533,00 dan biaya penggantian cetak STNK hilang sebesar Rp 30.576.000,00.

- **Pendapatan dari Pengembalian**

  Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp 3.567.366.658,00 dan direalisasikan sebesar Rp 5.894.145.382,92 atau 165,22% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.610.117.546,17 atau 37,58% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 4.284.027.836,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN				
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan	-	-	-	3.781.347.486,75
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	-	-	396.731.581,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	300.000,00	300.000,00	100,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.768.036,00	2.335.246.936,00	30.062,26	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	649.680,00	649.680,00	100,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	439.870.142,00	439.870.142,00	100,00	34.292.352,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	27.015.121,00	26.314.945,00	97,41	61.684.648,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	12.777.526,00	12.777.526,83	100,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.069.594.276,00	3.069.594.276,09	100,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	9.391.877,00	9.391.877,00	100,00	9.971.769,00
JUMLAH (Rp)	**3.567.366.658,00**	**5.894.145.382,92**	**165,22**	**4.284.027.836,75**

Pendapatan dari pengembalian merupakan setoran pengembalian belanja atas Tahun Anggaran yang sudah berlalu dan disetor tahun 2024, juga merupakan sebagian tindak lanjut temuan dari pemeriksaan Inpektorat, BPK, atau BPKP.

3.1.1.2. Pendapatan Transfer Rp 3.535.479.452.702,00 Rp 3.463.926.176.823,00

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 3.549.191.703.243,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.535.479.452.702,00 atau 99,61% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 71.553.275.879,00 atau 2,07% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 3.463.926.176.823,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 3.534.495.647.472,00 Rp 3.463.090.270.403,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 3.548.207.898.013,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.534.495.647.472,00 atau 99,61% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 71.405.377.069,00 atau 2,06% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 3.463.090.270.403,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	114.271.689.000,00	114.358.785.000,00	100,08	106.084.972.357,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.337.180.068.000,00	1.337.180.068.000,00	100,00	1.267.622.165.192,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	169.350.207.000,00	156.735.319.268,00	92,55	134.151.614.382,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	519.158.564.582,00	517.974.105.772,00	99,77	501.629.554.248,00
Jumlah (Rp)	**2.139.960.528.582,00**	**2.126.248.278.040,00**	**99,36**	**2.009.488.306.179,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	80.876.155.000,00
Dana Keistimewaan	1.396.157.452.431,00	1.396.157.452.432,00	100,00	1.372.725.809.224,00
Insentif Fiskal	12.089.917.000,00	12.089.917.000,00	100,00	-
Jumlah (Rp)	**1.408.247.369.431,00**	**1.408.247.369.432,00**	**100,00**	**1.453.601.964.224,00**
Jumlah (Rp) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**3.548.207.898.013,00**	**3.534.495.647.472,00**	**99,61**	**3.463.090.270.403,00**

3.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 983.805.230,00 Rp 835.906.420,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 983.805.230,00 dan direalisasikan sebesar Rp 983.805.230,00 atau 100,00% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 147.898.810,00 atau 17,69% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 835.906.420,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	983.805.230,00	983.805.230,00	100,00	835.906.420,00
Jumlah (Rp)	**983.805.230,00**	**983.805.230,00**	**100,00**	**835.906.420,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dirinci sebagai berikut:

- Bantuan keuangan kepada pemerintah DIY dari BPKAD Kota Yogyakarta sebesar Rp 718.832.590,00
- Belanja bantuan keuangan khusus dari BPKAD Kabupaten Bantul kepada pemerintah provinsi untuk sharing dan kontribusi pengelolaan IPAL Sewon sebesar Rp 120.347.030,00
- Kontribusi biaya pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat dari BPKAD Kabupaten Sleman sebesar Rp 144.625.610,00

3.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah **Rp 8.084.153.000,00** **Rp 7.955.658.016,00**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 7.856.240.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 8.084.153.000,00 atau 102,90% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 128.494.984,00 atau 1,62% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 7.955.658.016,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.20
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN HIBAH	**7.856.240.000,00**	**8.084.153.000,00**	**102,90**	**7.950.630.000,00**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	-	-	-	7.950.630.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	7.856.240.000,00	8.084.153.000,00	102,90	
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	**-**	**-**	**-**	**5.028.016,00**
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	-	-	5.028.016,00
Jumlah (Rp)	**7.856.240.000,00**	**8.084.153.000,00**	**102,90**	**7.955.658.016,00**

Pendapatan Hibah sebesar Rp 8.084.153.000,00 merupakan setoran sumbangan pengusaha dealer otomotif sebesar Rp.3.813.413.000,00; main dealer sebesar Rp 24.000.000,00; dan Jasa Raharja sebesar Rp 4.246.740.000,00.

		2024	2023 *(audited)*
3.1.2.	**Belanja Daerah**	**Rp 1.537.025.735.371,82**	**Rp 1.564.098.554.710,21**

Belanja Daerah BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 1.584.691.790.385,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.537.025.735.371,82 atau 96,99% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 27.072.819.338,39) atau (1,73%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2023 sebesar Rp 1.564.098.554.710,21 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1	**Belanja Operasi**	**Rp 103.542.451.454,00**	**Rp 107.107.129.734,00**

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 110.941.957.099,00 dan direalisasikan sebesar Rp 103.542.451.454,00 atau 93,33% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 3.564.678.280,00) atau (3,33%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp 107.107.129.734,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.21

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	86.782.554.179,00	80.614.113.785,00	92,89	81.428.952.462,00
Belanja Barang dan Jasa	24.159.402.920,00	22.928.337.669,00	94,90	25.678.177.272,00
Jumlah (Rp)	**110.941.957.099,00**	**103.542.451.454,00**	**93,33**	**107.107.129.734,00**

3.1.2.1.1.	**Belanja Pegawai**	**Rp 80.614.113.785,00**	**Rp 81.428.952.462,00**

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 86.782.554.179,00 dan direalisasikan sebesar Rp 80.614.113.785,00 atau 92,89% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 814.838.677,00) atau (1,00%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 81.428.952.462,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.22

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA PEGAWAI				
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	24.562.246.937,00	18.438.622.450,00	75,07	18.187.573.314,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.482.071.546,00	9.481.431.335,00	99,99	9.386.627.800,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.738.235.696,00	52.694.060.000,00	99,92	53.854.751.348,00
Jumlah (Rp)	**86.782.554.179,00**	**80.614.113.785,00**	**92,89**	**81.428.952.462,00**

3.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa **Rp 22.928.337.669,00** **Rp 25.678.177.272,00**

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 24.159.402.920,00 dan direalisasikan sebesar Rp 22.928.337.669,00 atau 94,90% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 2.749.839.603,00) atau (10,71%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 25.678.177.272,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.23

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA BARANG DAN JASA				
Belanja Barang				
Belanja Barang Pakai Habis	4.410.831.800,00	4.017.503.039,00	91,08	5.472.687.021,00
Jumlah (Rp)	**4.410.831.800,00**	**4.017.503.039,00**	**91,08**	**5.472.687.021,00**
Belanja Jasa				
Belanja Jasa Kantor	12.791.894.620,00	12.152.590.480,00	95,00	13.070.305.170,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	500.000.000,00	489.444.655,00	97,89	635.372.482,00
Belanja Sewa Tanah	16.140.000,00	11.298.000,00	70,00	10.760.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	337.741.300,00	329.103.837,00	97,44	439.947.135,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	247.400.000,00	242.450.000,00	98,00	312.000.000,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	45.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	107.250.000,00	107.250.000,00	100,00	130.020.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.300.600,00	99,30	99.644.700,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.834.140.000,00	1.731.503.792,00	94,40	1.547.393.480,00
Jumlah (Rp)	**15.934.565.920,00**	**15.162.941.364,00**	**95,16**	**16.290.442.967,00**
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	167.558.362,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.452.419.200,00	2.399.370.695,00	97,84	2.139.712.019,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	555.000.000,00	549.486.353,00	99,01	710.751.592,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.608.000,00	29.607.600,00	100,00	-
Jumlah (Rp)	**3.037.027.200,00**	**2.978.464.648,00**	**98,07**	**3.018.021.973,00**
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	776.978.000,00	769.428.618,00	99,03	897.025.311,00
Jumlah (Rp)	**776.978.000,00**	**769.428.618,00**	**99,03**	**897.025.311,00**
Jumlah (Rp) Belanja Barang dan Jasa	**24.159.402.920,00**	**22.928.337.669,00**	**94,90**	**25.678.177.272,00**

- **Belanja Barang Pakai Habis**

  Belanja Barang Pakai Habis BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 4.410.831.800,00 dan direalisasikan sebesar Rp 4.017.503.039,00 atau 91,08% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 1.455.183.982,00) atau (26,59%) dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5.472.687.021,00. Belanja barang pakai habis yang merupakan pembentuk barang Persediaan adalah sebesar Rp 3.412.797.039,00 sedangkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 529.191.000,00 dan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp 75.515.000,00 merupakan belanja barang pakai habis yang tidak membentuk barang Persediaan.

- **Belanja Jasa Kantor**

  Belanja Jasa Kantor BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 12.791.894.620,00 dan direalisasikan sebesar Rp 12.152.590.480,00 atau 95,00% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 917.714.690,00) atau (7,02%) dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp 13.070.305.170,00.

- **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**

  Belanja Iuran Jaminan/Asuransi BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 489.444.655,00 atau 97,89% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 145.927.827,00) atau (22,97%) dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp 635.372.482,00. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi merupakan Belanja Polis Asuransi Kendaraan Roda Empat Milik Pemda DIY sebesar Rp 205.347.000,00 dan Belanja Polis Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi Gedung Kantor Milik Pemda DIY sebesar Rp 284.097.655,00.

- **Belanja Sewa Tanah**

  Belanja Sewa Tanah BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 16.140.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 11.298.000,00 atau 70,00% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 538.000,00 atau 5,00% dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp 10.760.000,00. Belanja sewa tanah merupakan pembayaran atas sewa tanah kas Desa Bangunharjo untuk Samsat Sewon sesuai dengan Perjanjian No P/400.10.2.4/267 dan No 900/3102 tanggal 28 November 2023.

- **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**

  Belanja Sewa Peralatan dan Mesin BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 337.741.300,00 dan direalisasikan sebesar Rp 329.103.837,00 atau 97,44% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 110.843.298,00) atau (25,19%) dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp 439.947.135,00. Belanja sewa peralatan dan mesin merupakan belanja atas sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp 153.730.000,00; alat penyimpan perlengkapan kantor sebesar Rp 19.314.000,00; alat kantor lainnya sebesar Rp 11.558.462,00; dan alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp 144.501.375,00.

- **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**

  Belanja Sewa Gedung dan Bangunan BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 247.400.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 242.450.000,00 atau 98,00% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 69.550.000,00) atau (22,29%) dari realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 312.000.000,00. Sewa Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

  - Sewa tempat pelayanan kesamsatan di Galeria Mall Yogyakarta sebesar Rp 150.000.000,00
  - Sewa bangunan gedung tempat pertemuan sosialisasi peratiran perundang-undangan tentang PKB dan BBNKB di Kalurahan Panjatan, Wijimulyo, Bendungan, dan Kranggan sebesar Rp 1.700.000,00
  - Sewa bangunan gedung Samsat Desa Palihan Kapanewon Temon sebesar Rp 5.000.000,00
  - Sewa bangunan gedung Samsat Desa Kalurahan Banjararum sebesar Rp 5.000.000,00
  - Sewa bangunan gedung Samsat Desa Kalurahan Banyurejo, Tempel sebesar Rp 12.500.000,00
  - Sewa bangunan gedung Samsat Desa Kalurahan Pakembinangun, Pakem sebesar Rp 12.500.000,00
  - Sewa bangunan gedung Samsat Desa Kalurahan Argomulyo sebesar Rp 16.000.000,00
  - Sewa bangunan gedung Samsat Desa Kalurahan Wukirsari sebesar Rp 12.000.000,00
  - Sewa gedung sosialisasi pajak di Kalurahan Bimomartani Ngemplak dan Purwomartani sebesar Rp 1.200.000,00

- Sewa tempat dan tenaga kebersihan untuk kegiatan sosialisasi kesamsatan di Kelurahan Kotabaru, Bener, Karangwaru, Demangan, Tahunan, dan Baciro sebesar Rp 3.600.000,00
- Sewa bangunan gedung tempat pertemuan untuk sosialisasi pelayanan kesamsatan dan pajak daerah di kelurahan Nglanggeran, Gading, Logandeng, Salam, dan Bunder sebesar Rp 3.000.000,00
- Sewa bangunan gedung tempat layanan samsat online Kalurahan Semugih, Hargomulyo, dan Kemiri sebesar Rp 10.000.000,00
- Sewa gedung sosialisasi pajak di Kelurahan Banguntapan, Donotirto, Gilangharjo, Sendangsari, Wijirejo, Timbulharjo, Argorejo, Srigading, Trirenggo, Trimurti, Tamanan, Baturetno, Guwosari, Srimulyo, Wukirsari, Jagalan, dan Sitimulyo sebesar Rp 9.950.000,00

- **Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**

  Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 107.250.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 107.250.000,00 atau 100,00% sehingga mengalami penurunan dari realisasi tahun 2023 sebesar (Rp 22.770.000,00) atau (17,51%). Belanja sewa aset tetap lainnya merupakan pembayaran atas sewa tanaman di BPKA DIY selama tahun anggaran 2024.

- **Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**

  Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 99.300.600,00 atau 99,30% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 344.100,00) atau (0,35%) dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 99.644.700,00. Belanja jasa konsultansi konstruksi merupakan pembayaran atas kajian pemanfaatan BMD Eks Hotel Mutiara II di Jalan Malioboro Yogyakarta.

- **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**

  Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 1.834.140.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.731.503.792,00 atau 94,40% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 184.110.312,00 atau 11,90% dari realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.547.393.480,00

Tabel III.24

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA JASA			
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	265.815.000,00	265.760.542,00	99,98
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	1.478.325.000,00	1.375.999.750,00	93,08
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	90.000.000,00	89.743.500,00	99,72
Jumlah (Rp)	**1.834.140.000,00**	**1.731.503.792,00**	**94,40**

- **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

  Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 2.452.419.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2.399.370.695,00 atau 97,84% sehingga mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp 259.658.676,00 atau 12,14%. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel III.25

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA JASA			
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
Belanja Pemeliharaan Alat Besar	403.831.000,00	395.012.890,00	97,82
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan	193.740.000,00	170.098.539,00	87,80
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	502.235.000,00	490.224.975,00	97,61
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	1.312.613.200,00	1.304.034.291,00	99,35
Jumlah (Rp)	**2.452.419.200,00**	**2.399.370.695,00**	**97,84**

- **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

  Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 555.000.000,00dan direalisasikan sebesar Rp 549.486.353,00 atau 99,01% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 161.265.239,00) atau (22,69%) dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp 710.751.592,00. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dapat dirinci sebagai berikut:
  - Pemeliharaan bangunan gedung kantor pada BPKA DIY sebesar Rp 87.540.150,00
  - Pemeliharaan Gudang BPKA DIY di Abu Bakar Ali Kota Baru Yogyakarta sebesar Rp 9.848.000,00
  - Pemeliharaan Gudang BPKA DIY di Badran sebesar Rp 19.780.000,00
  - Pemeliharaan bangunan gedung Depo Arsip BPKA DIY di Kotagede sebesar Rp 19.720.000,00
  - Pemeliharaan gudang penyimpanan BMD sebesar Rp 37.255.000,00
  - Pemeliharaan gedung dan bangunan septic tank KPPD Kulon Progo sebesar Rp 23.539.686,00
  - Pemeliharaan gedung kantor KPPD Kulon Progo sebesar Rp 14.500.429,00
  - Pemeliharaan gedung kantor KPPD Sleman sebesar Rp 43.500.000,00
  - Pemeliharaan gedung kantor KPPD Kota sebesar Rp 44.645.088,00
  - Pemeliharaan gedung kantor KPPD Bantul sebesar Rp 149.500.000,00
  - Pemeliharaan gedung kantor KPPD Gunungkidul sebesar Rp 99.658.000,00

- **Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri**

  Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 776.978.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 769.428.618,00 atau 99,03% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 127.596.693,00) atau (14,22%) dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp 897.025.311,00.

Tabel III.26

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA JASA			
Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	390.788.000,00	390.344.018,00	99,89
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	311.670.000,00	305.815.000,00	98,12
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	74.520.000,00	73.269.600,00	98,32
Jumlah (Rp)	**776.978.000,00**	**769.428.618,00**	**99,03**

3.1.2.2 Belanja Modal **Rp 2.049.908.956,00** **Rp 1.278.974.722,00**

Belanja Modal BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 2.272.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2.049.908.956,00 atau 90,21% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 770.934.234,00 atau 60,28% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp 1.278.974.722,00dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.924.002.000,00	1.703.960.146,00	88,56	725.474.722,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	348.498.000,00	345.948.810,00	99,27	399.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	154.500.000,00
Jumlah (Rp)	**2.272.500.000,00**	**2.049.908.956,00**	**90,21**	**1.278.974.722,00**

3.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp 1.703.960.146,00** **Rp 725.474.722,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 1.924.002.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.703.960.146,00 atau 88,56% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 978.485.424,00 atau 134,88% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp 725.474.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			
Belanja Modal Alat Besar	25.000.000,00	24.959.999,00	99,84
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	118.325.000,00	116.496.250,00	98,45
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	29.802.000,00	29.430.000,00	98,75
Belanja Modal Komputer	1.750.875.000,00	1.533.073.897,00	87,56
JUMLAH (Rp)	**1.924.002.000,00**	**1.703.960.146,00**	**88,56**

3.1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Rp 345.948.810,00** **Rp 399.000.000,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 348.498.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 345.948.810,00 atau 99,27% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 53.051.190,00) atau (13,30%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 399.000.000,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengadaan bangunan landscape Samsat Sewon KPPD Bantul sebesar Rp 149.700.000,00 dan dan kapitalisasi belanja pemeliharaan gedung kantor KPPD Sleman sebesar Rp 196.248.810,00.

3.1.2.3. Belanja Tidak Terduga **Rp 20.000.000,00** **Rp 198.487.268,00**

Belanja Tidak Terduga BPKA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 12.443.010.243,00 dan direalisasikan sebesar Rp 20.000.000,00 atau 0,16% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 178.487.268,00) atau (89,92%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 198.487.268,00. Belanja Tidak Terduga direalisasikan untuk belanja sosial yang tidak direncanakan bagi korban bencana hidrometeorologi atas nama Ibu Nuraeni yang dirawat di RS Panti Rapih Yogyakarta.

3.1.2.4. Belanja Transfer **Rp 1.431.413.374.961,82** **Rp 1.455.513.962.986,21**

Belanja Transfer BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 1.459.034.323.043,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.431.413.374.961,82 atau 98,11% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 24.100.588.024,39) atau (1,66%) dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp 1.455.513.962.986,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	881.009.565.433,00	870.359.406.509,00	98,79	886.411.063.641,00
Belanja Bantuan Keuangan	578.024.757.610,00	561.053.968.452,82	97,06	569.102.899.345,21
Jumlah (Rp)	**1.459.034.323.043,00**	**1.431.413.374.961,82**	**98,11**	**1.455.513.962.986,21**

- **Belanja Bagi Hasil**

  Belanja Bagi Hasil BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 881.009.565.433,00 dan direalisasikan sebesar Rp 870.359.406.509,00 atau 98,79% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 16.051.657.132,00) atau (1,81%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp 886.411.063.641,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.30
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA BAGI HASIL				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten	728.598.144.703,00	719.748.610.040,00	98,79	733.339.431.691,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota	152.411.420.730,00	150.610.796.469,00	98,82	153.071.631.950,00
Jumlah (Rp)	**881.009.565.433,00**	**870.359.406.509,00**	**98,79**	**886.411.063.641,00**

Belanja Bagi Hasil BPKA Tahun Anggaran 2024 merupakan belanja bagi hasil atas penerimaan pajak daerah yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp 150.610.796.469,00; Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp 200.933.285.798,00; Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 126.121.177.020,00; Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp 284.554.946.950,00; dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.108.139.200.272,00 dengan rincian:

- Pajak Daerah Kurang Bayar Tahun 2023 sebesar Rp 1.664.838.465,00
- Pajak Daerah Triwulan I sebesar Rp 149.605.196.540,00
- Pajak Daerah Triwulan II sebesar Rp 146.639.421.745,00
- Pajak Daerah Triwulan III sebesar Rp 158.385.587.910,00
- Pajak Daerah Triwulan IV sebesar Rp 211.790.465.369,00
- Pajak Rokok Triwulan I sebesar Rp 79.421.405.963,00
- Pajak Rokok Triwulan II sebesar Rp 41.957.616.142,00
- Pajak Rokok Triwulan III sebesar Rp 48.392.633.720,00
- Pajak Rokok Triwulan IV sebesar Rp 32.502.240.655,00

- **Belanja Bantuan Keuangan**

  Belanja Bantuan Keuangan BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 578.024.757.610,00 dan direalisasikan sebesar Rp 561.053.968.452,82 atau 97,06% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 8.048.930.892,39) atau (1,41%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 569.102.899.345,21.

Tabel III.31

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA BANTUAN KEUANGAN				
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	445.070.578.811,00	428.964.512.711,77	96,38	432.033.573.508,53
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	132.954.178.799,00	132.089.455.741,05	99,35	137.069.325.836,68
Jumlah (Rp)	**578.024.757.610,00**	**561.053.968.452,82**	**97,06**	**569.102.899.345,21**

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari dua jenis belanja, yaitu BKK Kabupaten dan BKK Kalurahan/Desa. Selama tahun anggaran 2024, realisasi BKK sebesar Rp 561.053.968.452,82 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel III.32

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No.	Kegiatan BKK	Realisasi (Rp)
1	Tata Kelola Pertanahan	5.795.237.000,00
2	Padat Karya Jogja Istimewa	29.400.000.000,00
3	Kawasan Terpadu	15.670.000.000,00
4	Desa Mandiri Budaya	24.075.251.799,00
5	Arsitektur Gaya Yogyakarta	21.060.000.000,00
6	Desa Budaya	3.060.000.000,00
7	Demplot Jogja Hijau	1.500.000.000,00
8	Omah Jagawarga	2.050.000.000,00
9	Desa Maritim	3.286.000.000,00
10	Urusan Keistimewaan	238.940.404.833,00
11	Kampung Berkah	400.000.000,00
12	Kompensasi Dampak Negatif TPA/TPST Regional	550.000.000,00
13	Desa Preneur	3.016.320.000,00
14	Padat Karya Infrastruktur	91.500.000.000,00
15	Desa Wisata	7.950.000.000,00
16	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan	525.000.000,00
17	Balai Budaya	4.144.920.000,00
18	WBTB	2.000.000.000,00
19	Desa Prima	2.274.450.000,00
20	Pemilukada	12.000.000.000,00
21	Desa Mandiri Pangan	4.880.000.000,00
22	Kunjungan Gubernur	1.127.000.000,00
24	TU BKK Urusan Keistimewaan	94.839.603.526,00
	Total Belanja Bantuan Keuangan Khusus (Bruto)	**570.044.187.158,00**
	STS Pengembalian Belanja	**(8.990.218.705,18)**
	Total Belanja Bantuan Keuangan Khusus (Netto)	**561.053.968.452,82**

3.1.2.5. Surplus/Defisit Rp 4.393.962.204.349,03 Rp 4.188.379.481.275,44

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 4.240.775.202.632,00 dan direalisasikan sebesar Rp 4.393.962.204.349,03 atau 103,61%. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi Pendapatan Daerah dengan total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Surplus Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 205.582.723.073,59 atau 4,91% dibandingkan dengan Surplus Tahun 2023 sebesar Rp 4.188.379.481.275,44. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.33
Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
SURPLUS/DEFISIT				
Pendapatan Daerah	5.825.466.993.017,00	5.930.987.939.720,85	101,81	5.752.478.035.985,65
Belanja Daerah	1.584.691.790.385,00	1.537.025.735.371,82	96,99	1.564.098.554.710,21
Jumlah (Rp)	**4.240.775.202.632,00**	**4.393.962.204.349,03**	**103,61**	**4.188.379.481.275,44**

	2024	2023 *(audited)*
3.1.3. Pembiayaan Daerah	**Rp 93.121.146.320,48**	**Rp 160.555.386.955,24**

Pembiayaan Netto BPKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 90.535.532.554,00 dan direalisasikan sebesar Rp 93.121.146.320,48 atau 102,86% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 67.434.240.634,76) atau (42,00%) dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2023 sebesar Rp 160.555.386.955,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.34
Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	293.035.532.554,00	295.260.470.320,48	100,76	462.271.562.955,24
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	360.676.000,00	-	3.283.824.000,00
Jumlah (Rp)	**293.035.532.554,00**	**295.621.146.320,48**	**100,88**	**465.555.386.955,24**
Pengeluaran Pembiayaan				
Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	300.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Jumlah (Rp)	**202.500.000.000,00**	**202.500.000.000,00**	**100,00**	**305.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**90.535.532.554,00**	**93.121.146.320,48**	**102,86**	**160.555.386.955,24**

- **Penerimaan Pembiayaan**

  Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 295.621.146.320,48 merupakan penerimaan pembiayaan yang didapat dari SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 295.260.470.320,48 dengan rincian:
  - Pelampauan Penerimaan PAD sebesar Rp 22.183.456.278,00
  - Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp 6.234.221.086,00
  - Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 350.158.016,00

- Penghematan Belanja sebesar Rp 261.089.570.056,48
- Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp 5.403.064.884,00.

Ditambah dengan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 360.676.000,00 dengan rincian:

- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp 360.676.000,00

- **Pengeluaran Pembiayaan**

  Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 202.500.000.000,00 merupakan pembiayaan atas:

  - Pemberian pinjaman dana bergulir kepada BUKP Kemantren Danurejan Yogyakarta dan 19 BUKP lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 2.500.000.000,00
  - Penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY Tahun 2024 tahap pertama sebesar Rp 150.000.000.000,00
  - Penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY Tahun 2024 tahap kedua sebesar Rp 50.000.000.000,00.

		2024	2023 (*audited*)
3.1.4.	**Aset**	**Rp 3.741.261.694.686,76**	**Rp 3.435.224.836.467,80**

Aset BPKA per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.741.261.694.686,76 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 404.671.660.924,39; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp 2.403.324.094.535,51; Aset Tetap sebesar Rp 751.452.336.858,57; Aset Lainnya sebesar Rp 45.619.618.297,38; dan Properti Investasi sebesar Rp 136.193.984.070,90.

3.1.4.1.	**Aset Lancar**	**Rp 404.671.660.924,39**	**Rp 255.774.225.251,93**

Aset Lancar BPKA per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 404.671.660.924,39 terdiri dari Kas dan Setara Kas sebesar Rp 401.871.389.579,29; Piutang Pajak Daerah sebesar Rp 116.492.000,00; Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 185.156.692,98; Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 2.598.261.613,55; Penyisihan Piutang sebesar (Rp 2.721.001.932,84); Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 296.990.296,74 dan Persediaan sebesar Rp 2.324.372.674,67.

3.1.4.1.1.	**Kas dan Setara Kas**	**Rp 401.871.389.579,29**	**Rp 252.515.577.083,21**

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp 401.871.389.579,29 merupakan saldo awal Kas di Kas Daerah sebesar Rp 252.515.577.083,21 ditambah dan dikurangi dengan perhitungan sebagai berikut:

- Ditambah Setoran Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp 97.916.954,00
- Ditambah Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.699.762.322.550,85
- Dikurangi SP2D Belanja sebesar (Rp 5.550.504.427.008,77)

3.1.4.1.2.	**Piutang Pajak Daerah**	**Rp 116.492.000,00**	**Rp 116.492.000,00**

Saldo Piutang Pajak Daerah BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 116.492.000,00 terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 82.854.000,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 33.638.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 35
Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

No.	PIUTANG PAJAK DAERAH	SALDO AWAL 31-12-2023	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR 31-12-2024
	PIUTANG PKB	**82.854.000,00**	**-**	**-**	**82.854.000,00**
1	KPPD Kota	29.432.300,00	-	-	29.432.300,00
2	KPPD Bantul	18.912.000,00	-	-	18.912.000,00
3	KPPD GK	-	-	-	-
4	KPPD KP	5.559.000,00	-	-	5.559.000,00
5	KPPD Sleman	28.950.700,00	-	-	28.950.700,00
	PIUTANG BBNKB	**33.638.000,00**	**-**	**-**	**33.638.000,00**
1	KPPD Kota	2.055.000,00	-	-	2.055.000,00
2	KPPD Bantul	3.422.000,00	-	-	3.422.000,00
3	KPPD GK	0,00	-	-	0,00
4	KPPD KP	0,00	-	-	0,00
5	KPPD Sleman	28.161.000,00	-	-	28.161.000,00
	JUMLAH (Rp)	**116.492.000,00**	**-**	**-**	**116.492.000,00**

Tabel III.36
Kategori Umur Piutang Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	2024	2023
<1 Tahun	Lancar	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	2.092.500,00	3.312.000,00
>5 Tahun	Macet	114.399.500,00	113.180.000,00
JUMLAH (Rp)		**116.492.000,00**	**116.492.000,00**

Tabel III.37
Kategori Umur Piutang Pajak Daerah per Unit Kerja

UNIT KERJA	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH (Rp)
	<1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	>5 Tahun	
KPPD Kota	-	-	-	31.487.300,00	**31.487.300,00**
KPPD Bantul	-	-	562.400,00	21.771.600,00	**22.334.000,00**
KPPD Gunungkidul	-	-	-	-	**-**
KPPD Kulon Progo	-	-	-	5.559.000,00	**5.559.000,00**
KPPD Sleman	-	-	2.659.800,00	54.451.900,00	**57.111.700,00**
Jumlah (Rp)	**-**	**-**	**3.222.200,00**	**113.269.800,00**	**116.492.000,00**

3.1.4.1.3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan — **Rp 185.156.692,98** — **Rp 185.156.692,98**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 185.156.692,98 merupakan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang merupakan pengakuan piutang atas dividen BUKP Wates yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 185.156.692,98.

3.1.4.1.4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah — **Rp 2.598.261.613,55** — **Rp 2.610.701.613,55**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.598.261.613,55 terdiri dari Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp 2.050.000,00; Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp 28.957.850,00; Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp 210.348.281,55; dan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp 2.356.905.482,00; dan dengan rincian sebagai berikut**:**

Tabel III. 38
Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	SALDO AWAL 31-12-2023	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR 31-12-2024
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	28.957.850,00	-	-	28.957.850,00
3	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian	211.248.281,55	-	900.000,00	210.348.281,55
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.368.445.482,00	-	11.540.000,00	2.356.905.482,00
	TOTAL	**2.610.701.613,55**	**-**	**12.440.000,00**	**2.610.701.613,55**

- **Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

  Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.050.000,00 merupakan Piutang Hasil Sewa BMD berupa tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014. Terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2012 tanah tersebut telah diserahkan kembali kepada Pemda DIY karena penyewa sudah tidak sanggup untuk membayar sewa. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesarRp 2.050.000,00 tersebut dalam kategori macet.

- **Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**

  Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 28.957.850,00 bersumber dari Piutang Pendapatan Denda PKB sebesar Rp 27.079.650,00 dan Piutang Pendapatan Denda BBNKB sebesar Rp 1.878.200,00 yang telah ditetapkan namun belum dibayar oleh Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.39

Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per Unit Kerja

No.	PIUTANG PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	SALDO AWAL 31-12-2023	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR 31-12-2024
	PIUTANG PENDAPATAN DENDA PKB	**27.079.650,00**	**-**	**-**	**27.079.650,00**
1	KPPD Kota	9.717.450,00	-	-	9.717.450,00
2	KPPD Bantul	11.077.600,00	-	-	11.077.600,00
3	KPPD GK	-	-	-	-
4	KPPD KP	-	-	-	-
5	KPPD Sleman	6.136.200,00	-	-	6.136.200,00
	PIUTANG PENDAPATAN DENDA BBNKB	**1.878.200,00**	**-**	**-**	**1.878.200,00**
1	KPPD Kota	-	-	-	-
2	KPPD Bantul	607.000,00	-	-	607.000,00
3	KPPD GK	-	-	-	-
4	KPPD KP	148.400,00	-	-	148.400,00
5	KPPD Sleman	1.271.200,00	-	-	1.271.200,00
	JUMLAH (Rp)	**28.957.850,00**	**-**	**-**	**28.957.850,00**

Tabel III.40

Kategori Umur Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	2024
Belum jatuh tempo	Lancar	-
1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama	Kurang Lancar	-
1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua	Diragukan	1.129.700,00
1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga	Macet	27.828.150,00
JUMLAH (Rp)		**28.957.850,00**

Tabel III.41

Kualitas Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per Unit Kerja

UNIT KERJA	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH (Rp)
	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
KPPD Kota	-	-	-	9.717.450,00	9.717.450,00
KPPD Bantul	-	-	184.400,00	11.071.300,00	11.500.200,00
KPPD Kulon Progo	-	-	-	148.400,00	148.400,00
KPPD Sleman	-	-	945.300,00	6.462.100,00	7.407.400,00
JUMLAH (Rp)	**-**	**-**	**1.129.700,00**	**27.828.150,00**	**28.957.850,00**

- **Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

  Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2024 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau PejabatLain sebesar Rp 210.348.281,55 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel III.42

Rincian Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No.	PIUTANG PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2023			31-12-2024
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	211.248.281,55	-	900.000,00	210.348.281,55
	JUMLAH (Rp)	**211.248.281,55**	**-**	**900.000,00**	**210.348.281,55**

Piutang Piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dibayarkan oleh Sudjono dari Biro Perekonomian Unit Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 900.000,00 pada tahun anggaran 2024.

- **Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

  Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.356.905.482,00 terdiri atas Piutang Bunga Dana Bergulir sebesar Rp 2.220.131.482,00 dan Piutang Denda Dana Bergulir sebesar Rp 136.774.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.43

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

No.	PIUTANG HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR (BUNGA DAN DENDA)	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2023			31-12-2024
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	41.400.000,00	-	-	41.400.000,00
2	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	168.165.000,00		11.540.000,00	156.625.000,00
3	Dinas Koperasi dan UKM	2.140.856.482,00	-	-	2.140.856.482,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.024.000,00	-	-	18.024.000,00
	JUMLAH (Rp)	**2.368.445.482,00**	**-**	**11.540.000,00**	**2.356.905.482,00**

- Piutang Bunga Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan termasuk di dalamnya DPM LUEP dan DPM PHP sebesar Rp 9.900.000,00 serta Piutang Denda Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan termasuk di dalamnya DPM LUEP dan DPM PHP sebesar Rp 31.500.000,00
- Piutang Bunga Dana Bergulir di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan termasuk di dalamnya LPDM, Gapoktan Tahap Pra Petumbuhan, Penguatan LPDM, dan DPM LUEP (pelimpahan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) sebesar Rp 58.875.000,00 serta Piutang Denda Dana Bergulir di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp 97.750.000,00
- Piutang Bunga Dana Bergulir di Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp 2.140.856.482,00
- Piutang Bunga Dana Bergulir di Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk di dalamnya DPM Tahun 2012 dan DPM Tahun 2013 sebesar Rp 10.500.000,00 serta Piutang Denda Dana Bergulir di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 7.524.000,00

3.1.4.1.5. Penyisihan Piutang (Rp 2.721.001.932,84) (Rp 2.703.799.097,01)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, aset berupa piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sehingga nilai piutang harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Perhitungan penyisihan piutang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar : Belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (Penyisihan 0,5%)
2. Kualitas Kurang Lancar : Belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Surat Tagihan Pertama (Penyisihan 10%)
3. Kualitas Diragukan : Belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Surat Tagihan Kedua (Penyisihan 50%)
4. Kualitas Macet : Belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Surat TagihanKetiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara (Penyisihan 100%)

Penyisihan Piutang BPKA per 31 Desember 2024 sebesar (Rp 2.721.001.932,84) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar (Rp 115.445.750,00); Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar (Rp 18.515.669,29); dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar (Rp 2.587.040.513,55)) dengan rincian sebagai berikut:

- **Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

  Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah BPKA per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp 115.445.750,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.44
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	PRESENTASE PENYISIHAN	PIUTANG PAJAK DAERAH	PENYISIHAN PIUTANG
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	2.092.500,00	(1.046.250,00)
>5 Tahun	Macet	100%	114.399.500,00	(114.206.000,00)
JUMLAH (Rp)			**116.492.000,00**	**(115.445.750,00)**

Tabel III.45
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per Unit Kerja

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	%	KPPD KOTA	KPPD BANTUL	KPPD KP	KPPD SLEMAN	JUMLAH (Rp)
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-	-	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-	-	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	-	(189.000,00)	-	(857.250,00)	(1.046.250,00)
>5 Tahun	Macet	100%	(31.293.800,00)	(21.956.000,00)	(5.559.000,00)	(55.397.200,00)	(114.206.000,00)
JUMLAH (Rp)			**(31.293.800,00)**	**(22.145.000,00)**	**(5.559.000,00)**	**(56.254.450,00)**	**(115.252.250,00)**

- **Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

  Saldo Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar (Rp 18.515.669,29) merupakan penyisihan atas piutang deviden BUKP Wates yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan rincian penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel III.46
Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

URAIAN	SALDO AWAL PIUTANG	MUTASI TAHUN 2024		SALDO AKHIR PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	KETERANGAN
		BERTAMBAH	BERKURANG			
Piutang Dividen BUKP Wates	185.156.692,98	-	-	185.156.692,98	(18.515.669,30)	Piutang Kurang Lancar (10%)
Jumlah (Rp)	**185.156.692,98**	**-**	**-**	**185.156.692,98**	**(18.515.669,30)**	

- **Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

  Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah BPKA per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp 2.587.040.513,55) terdiri dari Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar (Rp 2.050.000,00), Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar (Rp 28.393.000,00); Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar (Rp 2.346.249.232,00), dan Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar (Rp 210.348.281,55) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.47
Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pos Neraca	Saldo Akhir 31-12-2024	Jatuh Tempo	Usia Piutang	Penyisihan Piutang	
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH					
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan					
Penyewaan Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman	2.050.000,00	31-12-2014	Macet	100%	(2.050.000,00)
Jumlah (Rp)	**2.050.000,00**				**(2.050.000,00)**

Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penyisihan piutang dari Penyewaan Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman sebesar Rp 2.050.000,00 yang jatuh tempo sejak 31 Desember 2014.

Tabel III.48
Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	PRESENTASE PENYISIHAN	PIUTANG PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	PENYISIHAN PIUTANG
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	1.129.700,00	(564.850,00)
>5 Tahun	Macet	100%	27.828.150,00	(27.828.150,00)
JUMLAH (Rp)			**28.957.850,00**	**(28.393.000,00)**

Tabel III.49

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per Unit Kerja

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	%	KPPD KOTA	KPPD BANTUL	KPPD KP	KPPD SLEMAN	JUMLAH (Rp)
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-	-	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-	-	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	-	92.200,00	-	472.650,00	564.850,00
>5 Tahun	Macet	100%	9.717.450,00	11.500.200,00	148.400,00	6.462.100,00	27.828.150,00
JUMLAH (Rp)			**9.717.450,00**	**11.592.400,00**	**148.400,00**	**6.934.750,00**	**28.393.000,00**

Tabel III.50

Rincian Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pos Neraca	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Jatuh Tempo	Usia Piutang	Penyisihan Piutang	
	31-12-2023	Bertambah	Berkurang	31-12-2024				
Piutang TGR								
Sudjono, Biro Perekonomian	21.368.136,55	-	900.000,00	20.468.136,55	s.d. Juli 2014 macet, mulai Agustus 2014 melakukan pembayaran	Macet	100%	20.468.136,55
40 Anggota DPRD DIY Periode 1999-2004 dan 2004-2009	189.880.145,00	-	-	189.880.145,00	Jatuh tempo 1 Sep 2011 untuk yang ber-SKTJM 1 Sep 2009 dan 1 April untuk yang ber-SKTJM 1 April 2010	Macet	100%	189.880.145,00
Jumlah (Rp)	**211.248.281,55**	**-**	**900.000,00**	**210.348.281,55**				**210.348.281,55**

Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan penyisihan piutang dari Sudjono, Biro Perekonomian sebesar (Rp 21.368.136,55) dan 40 (empatpuluh) Anggota DPRD DIY Periode 1999-2004 dan 2004-2009 sebesar (Rp 189.880.145,00). Selama Tahun Anggaran 2022, piutang yang berhasil tertagih adalah sebesar Rp 900.000,00.

Tabel III.51

Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

PIUTANG	PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG
Piutang Bunga Dana Bergulir	2.220.131.482,00	(2.209.475.232,00)
Piutang Denda Dana Bergulir	136.774.000,00	(136.774.000,00)
JUMLAH (Rp)	**2.356.905.482,00**	**(2.346.249.232,00)**

- Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir sebesar (Rp 2.209.475.232,00) merupakan penyisihan atas piutang bunga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar (Rp 9.900.000,00); Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar (Rp 58.875.000,00); Dinas Koperasi dan UKM sebesar (Rp 2.130.200.232,00); serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar (Rp 10.500.000,00)
- Penyisihan Piutang Denda Dana Bergulir sebesar (Rp 136.774.000,00) merupakan penyisihan atas piutang denda dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar (Rp 31.500.000,00); Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar (Rp 97.750.000,00); serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar (Rp 7.524.000,00).

3.1.4.1.6. Beban Dibayar Dimuka **Rp 296.990.296,74** **Rp 371.063.300,63**

Saldo Beban Dibayar Dimuka BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 296.990.296,74 dapat dirinci sebagai berikut:

- Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp 284.097.655,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2025. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 126.871.007,58 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 157.226.647,42
- Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp 205.347.000,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2025. Premi Asuransi Kendaraan Dinas tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 91.702.906,85 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 113.644.093,15
- Sewa Ruangan Kantor milik Pemdes Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk pelayanan Samsat Desa sebesar Rp 16.000.000,00 dengan masa sewa 1 Desember 2024 sampai dengan 30 November 2025. Sewa tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 telah diakui menjadi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp 1.358.904,11 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 14.641.095,89
- Sewa Ruangan Kantor milik Pemdes Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul untuk pelayanan Samsat Desa sebesar Rp 11.298.000,00 dengan masa sewa 28 November 2024 sampai dengan 27 November 2025. Sewa tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 telah diakui menjadi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp 1.052.416,44 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 10.245.583,56
- Sewa Ruangan Kantor milik Pemdes Palihan Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo untuk Pelayanan Samsat Desa sebesar Rp 5.000.000,00 dengan masa sewa 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025. Sewa tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 telah diakui menjadi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp 3.767.123,29 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 1.232.876,71

Tabel III.52
Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	Nama Asuransi	Tertanggung	Periode Pertanggungan			No. Polis	Premi	Beban Dibayar Dimuka	
1.	PT Asuransi Sinar Mas	PEMDA DIY	21/07/24	s/d	20/07/25	12.400.0016.54891 12.400.0016.69933	284.097.655,00	01/01/25 s.d. 21/07/25	157.226.647,42
2.	PT Asuransi Sinar Mas	PEMDA DIY	21/07/24	s/d	20/07/25	12.400.0016.62847	205.347.000,00	01/01/25 s.d. 20/07/25	113.644.093,15
3.	Sewa Pemdes Argomulyo	Pemdes Argomulyo	01/12/24	s/d	30/11/25	00.1.4.1/3277	16.000.000,00	01/01/25 s.d. 30/11/25	14.641.095,89
4.	Samsat Desa Bangunharjo	Pemdes Bangunharjo	28/11/24	s/d	27/11/25	900/3102	11.298.000,00	01/01/25 s.d. 27/11/25	10.245.583,56
4.	Sewa Pemdes Palihan	Pemdes Palihan	01/04/24	s/d	31/03/25	934/7796	5.000.000,00	01/01/25 s.d. 31/03/25	1.232.876,71
Jumlah (Rp)									**296.990.296,74**

3.1.4.1.7. Persediaan **Rp 2.324.372.674,67** **Rp 2.679.033.658,57**

Saldo Persediaan BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.324.372.674,67 terdiri dari Barang Pakai Habis dengan menyesuaikan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan. Saldo Persediaan BPKA per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp 354.660.983,90) atau (13,24%) dari saldo Persediaan BPKA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.679.033.658,57dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.324.372.674,67 berasal dari saldo awal sebesar Rp 2.679.033.658,57 ditambah dengan belanja barang pakai habis pembentuk barang Persediaan sebesar Rp 3.412.797.039,00; ditambah dengan belanja pemeliharaan yang membentuk barang persediaan sebesar Rp 67.501.232,00; ditambah belanja modal yang membentuk barang persediaan sebesar Rp 793.650,00; ditambah inventarisasi persediaan KPPD Kota karena temuan Inspektorat berupa adanya saldo Kertas dan Cover sebesar Rp 2.436.080,00; dan dikurangi (Rp 3.838.188.984,90) karena adanya penggunaan atau pemanfaatan persediaan. Adapun mutasi persediaan BPKA per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.453
Mutasi Persediaan

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	**Bahan**	**164.075.000,00**	**745.377.105,00**	**608.782.105,00**	**300.670.000,00**
	Bahan Kimia	-	30.000,00	30.000,00	-
	Bahan Bakar dan Pelumas	164.075.000,00	724.766.513,00	588.171.513,00	300.670.000,00
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	18.301.400,00	18.301.400,00	-
	Bahan Lainnya	-	2.279.192,00	2.279.192,00	-
2	**Suku Cadang**	**-**	**199.725.002,00**	**199.725.002,00**	**-**
	Suku Cadang Alat Angkutan	-	182.318.402,00	182.318.402,00	-
	Suku Cadang Alat Besar	-	5.685.000,00	5.685.000,00	-
	Suku Cadang Lainnya	-	11.721.600,00	11.721.600,00	-
3	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor**	**2.514.958.658,57**	**2.538.425.894,00**	**3.029.681.877,90**	**2.023.702.674,67**
	Alat Tulis Kantor	450.576.330,69	153.464.241,00	298.551.676,56	305.488.895,13
	Kertas dan Cover	205.776.314,08	202.619.352,00	159.585.027,38	248.810.638,70
	Bahan Cetak	899.964.465,60	1.033.906.080,00	1.381.808.809,27	552.061.736,33
	Benda Pos	5.760.000,00	9.560.000,00	12.700.000,00	2.620.000,00
	Bahan Komputer	774.274.197,87	971.585.414,00	986.804.922,98	759.054.688,89
	Perabot Kantor	28.614.993,33	53.806.503,00	67.426.582,73	14.994.913,60
	Alat Listrik	112.249.677,00	86.349.122,00	88.011.976,98	110.586.822,02
	Perlengkapan Dinas	360.000,00	3.719.876,00	3.764.876,00	315.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.382.680,00	1.514.306,00	9.127.006,00	29.769.980,00
	Natura	-	21.901.000,00	21.901.000,00	-
JUMLAH (Rp)		**2.679.033.658,57**	**3.483.528.001,00**	**3.838.188.984,90**	**2.324.372.674,67**

		2024	2023 *(audited)*
3.1.4.3.	**Investasi Jangka Panjang**	**Rp 2.403.324.094.535,51**	**Rp 2.314.261.699.024,12**

Investasi Jangka Panjang BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.403.324.094.535,51 mengalami kenaikan sebesar Rp 89.062.395.511,39 atau 3,85% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 2.314.261.699.024,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.54

Rincian Investasi Jangka Panjang

URAIAN	2024	2023
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**7.462.500.000,00**	**6.319.276.632,00**
Dana Bergulir	7.462.500.000,00	6.319.276.632,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	**2.395.861.594.535,51**	**2.307.942.422.392,12**
Penyertaan Modal	2.395.861.594.535,51	2.307.942.422.392,12
JUMLAH (Rp)	**2.403.324.094.535,51**	**2.314.261.699.024,12**

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp 2.403.324.094.535,51 terdiri atas Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp 7.462.500.000,00 serta Investasi Jangka Panjang Permanen berupa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 2.394.671.594.535,51 dan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.190.000.000,00.

3.1.4.3.1.	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**Rp 7.462.500.000,00**	**Rp 6.319.276.632,00**

- **Dana Bergulir**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp 7.462.500.000,00 merupakan InvestasI sebesar Net Present Value (NPV) yang didapatkan dari saldo awal Dana Bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp 10.794.077.964,00 ditambah penyertaan modal BUKP Tahun 2024 sebesar Rp 2.500.000.000,00 dikurangi pelunasan sebesar (Rp 360.676.000,00) serta dikurangi penyisihan Dana Bergulir sebesar (Rp 5.470.901.964,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.55

Tabel Mutasi Dana Bergulir

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun	Nilai Pengguliran	Saldo 31-12-2023	Mutasi 2024		Saldo 31-12-2024	Penyisihan		Net Present Value	Keterangan
					Tambah	Kurang		%	Rp		
1	**DPKP**		**20.229.417.900,00**	**1.887.326.000,00**	**-**	**20.676.000,00**	**1.866.650.000,00**		**1.866.650.000,00**	**-**	
	DPM PHP Th 2011	2011	2.390.000.000,00	185.000.000,00	-	-	185.000.000,00	100%	185.000.000,00	-	Suku bunga 3%, Jangka waktu 1 th
	DPM PHP Th 2012	2012	3.400.000.000,00	241.000.000,00	-	-	241.000.000,00	100%	241.000.000,00	-	
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	104.500.000,00	-	10.000.000,00	94.500.000,00	100%	94.500.000,00	-	Suku bunga 3%, Jangka waktu 1 th
	DPM LUEP	2011	3.569.417.900,00	1.356.826.000,00	-	10.676.000,00	1.346.150.000,00	100%	1.346.150.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 th
2	**Dinas Koperasi dan UKM**		**31.732.100.000,00**	**2.643.251.964,00**	**-**	**-**	**2.643.251.964,00**		**2.643.251.964,00**	**-**	
	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur 2009	2009	200.000.000,00	55.615.598,00	-	-	55.615.598,00	100%	55.615.598,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Perkuatan Permodalan bagi KUKS/UJKS Kop 2010	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010	2010	3.000.000.000,00	166.057.582,00	-	-	166.057.582,00	100%	166.057.582,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	92.422.098,00	-	-	92.422.098,00	100%	92.422.098,00	-	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 th

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun	Nilai Pengguliran	Saldo 31-12-2023	Mutasi 2024		Saldo 31-12-2024	Penyisihan		Net Present Value	Keterangan
					Tambah	Kurang		%	Rp		
	Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006	2006	2.4292.500.000,00	567.715.775,00	-	-	567.715.775,00	100%	567.715.775,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 th
	Ketahanan Pangan 2007	2007	1.100.000.000,00	64.950.000,00	-	-	64.950.000,00	100%	64.950.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Prospek Mandiri 2007	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2007	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	-	-	50.800.000,00	100%	50.800.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Prospek Mandiri 2008	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	100%	80.000.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Koperasi Karyawan 2008	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	2008	630.000.000,00	165.734.227,00	-	-	165.734.227,00	100%	165.734.227,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Pemberdayaan Koperasi 2011	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00	-	-	239.912.400,00	100%	239.912.400,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011	2011	2.500.000.000,00	400.736.502,00	-	-	400.736.502,00	100%	400.736.502,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	-	-	184.909.300,00	100%	184.909.300,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013	2013	4.200.000.000,00	86.560.178,00	-	-	86.560.178,00	100%	86.560.178,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	2016	3.500.000.000,00	38.652.204,00	-	-	30.319.604,00	100%	30.319.604,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	169.807.300,00	-	-	158.863.500,00	100%	158.863.500,00	-	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	135.321.600,00	-	-	68.655.200,00	100%	68.655.200,00	-	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 th
3	**BUKP**		**19.000.000.000,00**	**6.130.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**340.000.000,00**	**8.290.000.000,00**		**827.500.000,00**	**7.462.500.000,00**	
	Tahun 2019	2019	10.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Tahun 2020	2020	4.000.000.000,00	1.130.000.000,00	-	340.000.000,00	790.000.000,00	100%	790.000.000,00	-	
	Tahun 2023	2023	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	5.000.000.000,00	0,50%	25.000.000,00	4.975.000.000,00	
	Tahun 2024	2024	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	0,50%	12.500.000,00	2.487.500.000,00	
4	**Dislautkan**		**2.915.000.000,00**	**133.500.000,00**	**-**	**-**	**133.500.000,00**		**133.500.000,00**	**-**	
	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	-	-	133.500.000,00	100%	133.500.000,00	-	Suku bunga 3%, Jangka waktu 1 th
	JUMLAH		**73.876.517.900,00**	**10.794.077.964,00**	**2.500.000.000,00**	**360.676.000,00**	**12.933.401.964,00**		**5.470.901.964,00**	**7.462.500.000,00**	

3.1.4.3.2. Investasi Jangka Panjang Permanen — Rp 2.395.861.594.535,51 — Rp 2.307.942.422.392,12

- **Penyertaan Modal**

  Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.395.861.594.535,51 diperoleh dari saldo awal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.307.942.422.392,12 dan disesuaikan dengan perhitungan sebagai berikut:

  - Dikurangi penyesuaian perhitungan Ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2023 sebesar (Rp 57.517.563.402,35) sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2023 Bagian Pemda DIY menjadi Rp 2.250.424.858.989,77
  - Ditambah penyertaan modal Tahun 2024 sebesar Rp 200.000.000.000,00
  - Dikurangi deviden Tahun 2024 yang disetor ke BUD melalui Metode Ekuitas sebesar (Rp 120.935.677.671,93)
  - Ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2024 Bagian Pemda DIY sebesar Rp 148.496.428.399,89
  - Dikurangi penyesuaian nilai ekuitas BUMD sebesar (Rp 82.124.015.182,22)

Tabel III.56

Tabel Mutasi Penyertaan Modal

No	Perusahaa nDaerah	% Saham Pemda DIY	Penyertaan Modal 31-12-2023	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY	Mutasi Tahun Anggaran 2024					Penyertaan Modal 31-12-2024
					Tambahan Modal Disetor Tahun 2024	Deviden Tahun 2023 yang disetor ke BUD Tahun 2024	% Saham Pemda DIY	Laba/Rugi BUMD Tahun 2024	Laba/Rugi BUMD Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	
	METODE EKUITAS									
1	PT. Bank BPD DIY	52,803%	1.994.491.661.504,15	1.943.169.750.256,05	200.000.000.000,00	111.028.716.629,00	52,000%	317.338.139.350,00	165.015.832.462,00	2.124.318.765.845,64
2	PT. AMI	99,968%	42.148.523.235,40	39.197.072.478,66	-	857.255.892,00	99,990%	6.397.808.071,00	6.397.168.290,19	43.384.353.348,78
3	PD.Tarumartani	99,999%	74.295.677.454,19	72.146.607.943,71	-	4.469.464.798,00	99,990%	(17.428.938.401,00)	(17.427.195.507,16)	45.322.454.221,31
4	BUKP	82,246%	46.010.572.778,97	44.915.440.886,66	-	4.580.240.352,93	83,140%	583.945.958,94	794.665.770,60	38.124.076.310,82
5	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY	100,00%	149.805.987.419,42	149.805.987.424,70	-	-	100,00%	(6.284.042.615,74)	(6.284.042.615,74)	143.521.944.808,97
	METODE HARGA PEROLEHAN									
6	PT. ABA	0,373%	1.190.000.000,00		-	-	0,373%	-	-	1.190.000.000,00
	JUMLAH		**2.307.942.422.392,12**	**2.249.234.858.989,78**	**200.000.000.000,00**	**120.935.677.671,93**		**300.606.912.363,20**	**148.496.428.399,89**	**2.395.861.594.535,52**

Perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Taru Martani, dan BUKP menggunakan Metode Ekuitas sedangkan penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan Metode Harga Perolehan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal pada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp 2.124.318.765.845,64. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Bank BPD DIY per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2023	52,803% x Rp 3.680.064.611.904,00	Rp 1.943.169.750.256,05
• Tambahan Modal Disetor		Rp 200.000.000.000,00
• Deviden Tahun 2023 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2024		(Rp 111.028.716.629,00)
• Laba Tahun 2024	Rp 317.338.139.350,00	
• Laba Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	52,000% x Rp 317.338.139.350,00	Rp 165.015.832.462,00
• Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		(Rp 72.838.100.243,41)
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2024		**Rp 2.124.318.765.845,64**

b. Penyertaan Modal pada PT. Aninda Mitra Internasional sebesar Rp 43.384.353.348,78. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2023	99,968% x Rp 39.209.657.865,00	Rp 39.197.072.478,66
• Deviden Tahun 2023 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2024		(Rp 857.255.892,00)
• Laba Tahun 2024	Rp 6.397.808.071,00	
• Laba Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	99,990% x Rp 6.397.808.071,00	Rp 6.397.168.290,19
• Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		(Rp 1.352.631.528,08)
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2024		**Rp 43.384.353.348,78**

c. Penyertaan Modal pada PT. Taru Martani sebesar Rp 45.322.454.221,31. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Taru Martani per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2023	99,999% x Rp 72.147.329.417,00	Rp 72.146.607.943,71
• Deviden Tahun 2023 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2024		(Rp 4.469.464.798,00)
• Laba Tahun 2024	(Rp 17.428.938.401,00)	
• Laba Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	99,990% x (Rp 17.428.938.401,00)	(Rp 17.427.195.507,16)
• Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		(Rp 4.927.493.417,24)
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2024		**Rp 45.322.454.221,31**

d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sebesar Rp 38.124.076.310,82. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2023	82,246% x Rp 54.611.094.626,68	Rp 44.915.440.886,66
• Deviden Tahun 2023 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2024		(Rp 4.580.240.352,93)
• Laba Tahun 2024	Rp 583.945.958,94	
• Laba Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	83,140% x Rp 583.945.958,94	Rp 794.665.770,60
• Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		(Rp 3.005.789.993,50)
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2024		**Rp 38.124.076.310,82**

e. Penyertaan Modal pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sebesar Rp 143.521.944.808,97. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2023	100,00% x Rp 149.805.987.424,70	Rp 149.805.987.424,70
• Laba Tahun 2024	(Rp 6.284.042.615,74)	
• Laba Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	100,00% x (Rp 6.284.042.615,74)	(Rp 6.284.042.615,74)
• Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		0,01
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2024		**Rp 143.521.944.808,97**

f. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp 1.190.000.000,00 adalah modal disetor sebesar 0,373% dari seluruh Modal PT. Asuransi Bangun Askrida. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode perolehan dengan perhitungan sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2024	Rp 1.190.000.000,00
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2024	**Rp 1.190.000.000,00**

Pada Tahun 2024 tidak terdapat penambahan modal disetor sehingga saldo penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.190.000.000,00 sesuai dengan saldo terakhir pada tahun anggaran 2023.

		2024	2023 (*audited*)
3.1.4.2.	**Aset Tetap**	**Rp 751.452.336.858,57**	**Rp 686.827.865.192,87**

Aset Tetap BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 751.452.336.858,57 merupakan nilai buku Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp 897.888.681.065,87 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp 146.436.344.207,30). Aset Tetap BPKA per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 64.624.471.665,70 atau 9,41% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 686.827.865.192,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.57
Rincian Aset Tetap

No.	URAIAN	2024	2023
1	Tanah	595.379.993.370,00	534.338.602.993,00
2	Peralatan dan Mesin	100.192.407.845,40	94.737.684.239,40
3	Gedung dan Bangunan	178.069.740.402,00	169.672.596.442,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.686.509.539,47	15.883.179.851,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.311.964.727,00	234.400.692,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.248.065.182,00	401.317.200,00
	JUMLAH (Rp)	**897.888.681.065,87**	**815.267.781.417,40**
7	Akumulasi Penyusutan	(146.436.344.207,30)	(128.439.916.224,53)
	JUMLAH (Rp)	**751.452.336.858,57**	**686.827.865.192,87**

3.1.4.2.1.	**Tanah**	**Rp 595.379.993.370,00**	**Rp 534.338.602.993,00**

Saldo Tanah BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 595.379.993.370,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 61.041.390.377,00 atau 11,42% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 534.338.602.993,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Mutasi (bertambah) Tanah sebesar Rp 114.410.905.835,00 berasal dari:**
  - Mutasi masuk sebesar Rp 100.353.250.160,00 dengan rincian:
    - Mutasi masuk dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebesar Rp 3.405.402.000,00
    - Mutasi masuk dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebesar Rp 6.904.886.680,00
    - Mutasi masuk dari Dinas Kebudayaan DIY sebesar Rp 90.035.961.480,00
    - Mutasi masuk dari Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta sebesar Rp 7.000.000,00
  - Mutasi masuk gabung aset sebesar Rp 13.975.557.800,00
  - Koreksi kode barang masuk sebesar Rp 82.097.875,00

- **Mutasi (berkurang) Tanah sebesar (Rp 53.369.515.458,00) berasal dari:**
  - Mutasi keluar sebesar (Rp 5.780.625.000,00) dengan rincian:
    - Mutasi keluar ke Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sebesar (Rp 5.754.000.000,00)
    - Mutasi keluar ke Balai Pelatihan Kesehatan sebesar (Rp 26.625.000,00)
  - Mutasi keluar gabung aset sebesar (Rp 12.532.507.018,00)
  - Koreksi BPK berupa Reklasifikasi dari Kemitraan dengan Pihak ketiga dan Tanah ke Properti Investasi sebesar (Rp 35.056.383.440,00)

Tabel III.58

Rincian Mutasi Tanah

TANAH	
SALDO AWAL	**534.338.602.993,00**
Penambahan:	
Mutasi Masuk dari Eksternal	100.353.250.160,00
Mutasi Masuk Gabung Aset	13.975.557.800,00
Koreksi Kode Barang Masuk	82.097.875,00
JUMLAH (Rp)	**114.410.905.835,00**
Pengurangan:	
Mutasi Keluar ke Eksternal	(5.780.625.000,00)
Mutasi Keluar Gabung Aset	(12.532.507.018,00)
Koreksi BPK untuk Properti Investasi	(35.056.383.440,00)
JUMLAH (Rp)	**(53.369.515.458,00)**
SALDO AKHIR	**595.379.993.370,00**

Tabel III.59

Rincian Tanah

No	URAIAN	2024	2023
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	8.567.138.540,00	8.526.938.540,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	145.873.507.080,00	55.837.545.600,00
3	Tanah untuk Bangunan Industri	1.261.546.000,00	1.261.546.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	406.206.709.750,00	409.524.096.853,00
5	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	675.100.000,00	675.100.000,00
6	Tanah Persil Lainnya	-	25.717.384.000,00
7	Tanah Pertanian	279.542.000,00	279.542.000,00
8	Tanah Lapangan Olahraga	32.516.450.000,00	32.516.450.000,00
JUMLAH (Rp)		**595.379.993.370,00**	**534.338.602.993,00**

3.1.4.2.2 Peralatan dan Mesin Rp 100.192.407.845,40 Rp 94.737.684.239,40

Saldo Peralatan dan Mesin BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 100.192.407.845,40 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.454.723.606,00 atau 5,76% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 94.737.684.239,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.60

Rincian Peralatan dan Mesin

No.	URAIAN	2024	2023
1	Alat Besar	15.032.414.037,00	12.221.181.850,00
2	Alat Angkutan	11.121.930.700,00	11.121.930.700,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.388.695.695,00	1.263.738.925,00
4	Alat Pertanian	178.665.000,00	48.688.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.834.084.281,41	44.585.573.729,41
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.388.896.550,00	5.352.125.550,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	126.479.760,00	133.040.000,00
8	Alat Laboratorium	979.390.090,00	973.345.000,00
9	Komputer	20.274.822.351,99	18.878.851.484,99
10	Alat Keselamatan Kerja	121.137.110,00	70.614.000,00
11	Alat Persenjataan	71.440.500,00	-
12	Rambu-Rambu	589.285.200,00	4.200.000,00
13	Peralatan Olahraga	84.395.000,00	84.395.000,00
14	Peralatan Proses/Produksi	771.570,00	-
	JUMLAH	**100.192.407.845,40**	**94.737.684.239,40**

- **Mutasi (bertambah) Peralatan dan Mesin sebesar Rp 6.106.107.165,00 berasal dari:**
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.672.466.496,00
  - Mutasi masuk sebesar Rp 4.022.443.599,00 dengan rincian:
    - Mutasi masuk dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebesar Rp 621.649.181,00
    - Mutasi masuk dari Dinas Kebudayaan DIY sebesar Rp 47.550.000,00
    - Mutasi masuk dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sebesar Rp 2.829.183.418,00
    - Mutasi masuk dari Dinas Perhubungan DIY sebesar Rp 524.061.000,00
  - Reklasifikasi dari aset extracomptable sebesar Rp 333.218.620,00
  - Koreksi kode barang masuk sebesar Rp 77.978.450,00

- **Mutasi (berkurang) Peralatan dan Mesin sebesar (Rp 651.383.559,00) berasal dari:**
  - Usulan Penghapusan Aset Rusak Berat/Usang sebesar (Rp 634.877.149,00)
  - Mutasi keluar ke Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebesar (Rp 14.806.410,00)
  - Reklasifikasi ke aset extracomptable sebesar (Rp 1.700.000,00)

Tabel III.61
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

PERALATAN DAN MESIN	
SALDO AWAL	**94.737.684.239,40**
Penambahan:	
Belanja Modal	1.672.466.496,00
Mutasi Masuk dari Eksternal	4.022.443.599,00
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel	333.218.620,00
Koreksi Kode Barang Masuk	77.978.450,00
JUMLAH (Rp)	**6.106.107.165,00**
Pengurangan:	
Usulan Penghapusan	(634.877.149,00)
Mutasi Keluar ke Eksternal	(14.806.410,00)
Reklasifikasi ke Aset Extracomptable	(1.700.000,00)
JUMLAH (Rp)	**(651.383.559,00)**
SALDO AKHIR	**100.192.407.845,40**

3.1.4.2.3. Gedung dan Bangunan Rp 178.069.740.402,00 Rp 169.672.596.442,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 178.069.740.402,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.397.143.960,00 atau 4,95% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 169.672.596.442,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel III.62
Rincian Gedung dan Bangunan

No.	URAIAN	2024	2023
1	Bangunan Gedung	175.468.250.614,00	167.652.367.350,00
2	Monumen	463.759.190,00	-
3	Bangunan Menara	-	30.300.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.137.730.598,00	1.989.929.092,00
JUMLAH (Rp)		**178.069.740.402,00**	**169.672.596.442,00**

- **Mutasi (bertambah) Gedung dan Bangunan sebesar Rp 48.404.986.225,00 berasal dari:**
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 345.948.810,00
  - Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp 34.059.018,00
  - Hibah dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI sebesar Rp 747.401.996,00
  - Mutasi masuk sebesar Rp 8.655.591.937,00 dengan rincian:
    - Mutasi masuk dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebesar Rp 2.193.535.836,00
    - Mutasi masuk dari Dinas Kebudayaan DIY sebesar Rp 211.957.000,00
    - Mutasi masuk dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebesar Rp 4.168.831.399,00
    - Mutasi masuk dari SMK Negeri 1 Cangkringan sebesar Rp 2.050.018.780,00
    - Mutasi masuk dari Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta sebesar Rp 31.248.922,00
  - Mutasi masuk gabung aset sebesar Rp 37.968.856.678,00
  - Reklasifikasi dari aset extracomptable sebesar Rp 204.050.000,00
  - Koreksi kode barang masuk sebesar Rp 449.077.786,00

- **Mutasi (berkurang) Gedung dan Bangunan sebesar (Rp 40.007.842.265,00) yang berasal dari:**
  - Usulan Penghapusan Aset Rusak Berat/Usang sebesar (Rp 93.146.000,00)
  - Mutasi keluar ke Balai Pelatihan Kesehatan DIY sebesar (Rp 1.699.002.630,00)
  - Pecah aset sebesar (Rp 33.200.000,00)
  - Mutasi keluar gabung aset sebesar (Rp 37.715.077.796,00)
  - Koreksi kode barang keluar sebesar (Rp 467.415.839,00)

Tabel III.63
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

GEDUNG DAN BANGUNAN	
SALDO AWAL	**169.672.596.442,00**
Penambahan:	
Belanja Modal	345.948.810,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	34.059.018,00
Hibah Masuk	747.401.996,00
Mutasi Masuk dari Eksternal	8.655.591.937,00
Mutasi Masuk Gabung Aset	37.968.856.678,00
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel	204.050.000,00
Koreksi Kode Barang Masuk	449.077.786,00
JUMLAH (Rp)	**48.404.986.225,00**
Usulan Penghapusan	(93.146.000,00)
Mutasi Keluar ke Eksternal	(1.699.002.630,00)
Pecah Aset	(33.200.000,00)
Mutasi Keluar Gabung Aset	(37.715.077.796,00)
Koreksi Kode Barang Keluar	(467.415.839,00)
JUMLAH (Rp)	**(40.007.842.265,00)**
SALDO AKHIR	**178.069.740.402,00**

3.1.4.2.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 20.686.509.539,47 Rp 15.883.179.851,00

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 20.686.509.539,47 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.803.329.688,47 atau 30,24% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 15.883.179.851,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.64
Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	URAIAN	2024	2023
1	Jalan dan Jembatan	13.638.506.987,00	9.357.996.762,00
2	Bangunan Air	2.902.080.702,47	2.548.651.639,00
3	Instalasi	587.574.250,00	587.574.250,00
4	Jaringan	3.558.347.600,00	3.388.957.200,00
JUMLAH (Rp)		**20.686.509.539,47**	**15.883.179.851,00**

- **Mutasi (bertambah) Jalan, Jaringan, dan Irigasi BPKA sebesar Rp 4.803.329.688,47 berasal dari:**
  - Mutasi masuk sebesar Rp 4.801.213.849,47 dengan rincian:
    - Mutasi masuk dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebesar Rp 4.776.713.849,47
    - Mutasi masuk dari Dinas Kebudayaan DIY sebesar Rp 24.500.000,00
  - Koreksi nilai sebesar Rp 2.115.839,00

Tabel III.65
Rincian Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi

JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	
SALDO AWAL	**15.883.179.851,00**
Penambahan:	
Mutasi Masuk dari Eksternal	4.801.213.849,47
Koreksi Nilai	2.115.839,00
JUMLAH (Rp)	**4.803.329.688,47**
SALDO AKHIR	**20.686.509.539,47**

		2024	2023 *(audited)*
3.1.4.4.	**Aset Tetap Lainnya**	**Rp 2.311.964.727,00**	**Rp 234.400.692,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.311.964.727,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.077.564.035,00 atau 886,33% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 234.400.692,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.66
Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	URAIAN	2024	2023
1	Bahan Perpustakaan	217.633.100,00	216.950.691,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.864.480,00	2.600.001,00
3	Tanaman	14.850.000,00	14.850.000,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	2.076.617.147,00	-
JUMLAH (Rp)		**2.311.964.727,00**	**234.400.692,00**

- **Mutasi (bertambah) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 2.077.564.035,00 berasal dari:**
  - Hibah dari Balai Besar PJN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp 675.952.682,00
  - Mutasi masuk dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebesar Rp 1.400.664.465,00

Tabel III.67
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

ASET TETAP LAINNYA	
SALDO AWAL	**234.400.692,00**
Penambahan:	
Hibah Masuk	675.952.682,00
Mutasi Masuk dari Eksternal	1.400.664.465,00
SALDO AKHIR	**2.311.964.727,00**

3.1.4.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp 1.248.065.182,00** **Rp 401.317.200,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.248.065.182,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 846.747.982,00 atau 210,99% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 401.317.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

- **Mutasi (bertambah) Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp 846.747.982,00 berasal dari:**
  - Mutasi masuk sebesar Rp 846.747.982,00 dengan rincian:
    - Mutasi masuk dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebesar Rp 542.889.100,00
    - Mutasi masuk dari Dinas Kebudayaan sebesar Rp 303.858.882,00

Tabel III.68
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	
SALDO AWAL	**401.317.200,00**
Penambahan:	
Mutasi Masuk dari Eksternal	846.747.982,00
SALDO AKHIR	**1.248.065.182,00**

3.1.4.6. Akumulasi Penyusutan **(Rp 146.436.344.207,30)** **(Rp 128.439.916.224,53)**

Saldo Akumulasi Penyusutan BPKA per 31 Desember 2024 sebesar (Rp 146.436.344.207,30) berasal dari saldo awal akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp 128.439.916.224,53); ditambah mutasi masuk aset tetap tahun 2024 sebesar (Rp 9.202.930.411,97); ditambah dengan pembebanan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2024 sebesar (Rp 9.011.847.475,44); ditambah akumulasi penyusutan koreksi salah nilai sebesar (Rp 9.766.610.234,21); ditambah akumulasi penyusutan pindah kode barang masuk sebesar (Rp 13.200.198.185,99); dikurangi dengan mutasi keluar aset tetap tahun 2024 sebesar Rp 40.291.449,45; ditambah penyusutan pindah kode barang keluar sebesar Rp 13.864.659.583,62; ditambah penyusutan koreksi salah nilai keluar sebesar Rp 9.280.207.291,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.69
Rincian Akumulasi Penyusutan

No.	URAIAN	2024	2023
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(93.829.129.780,49)	(86.405.798.258,61)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(39.660.616.048,83)	(33.576.381.138,28)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(12.946.598.377,98)	(8.457.736.827,64)
JUMLAH (Rp)		**146.436.344.207,30**	**(128.439.916.224,53)**

		2024	2023 (*audited*)
3.1.4.4.	**Aset Lainnya**	**Rp 45.619.618.297,38**	**Rp 178.361.046.998,88**

Aset Lainnya meliputi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain berupa Aset Rusak Berat/Usang serta Aset yang Tidak Dapat Digunakan dalam Operasional Pemerintah, dan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF). Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 45.619.618.297,38 merupakan nilai buku Aset Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp 54.829.932.986,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp 9.382.123.688,62) ditambah dengan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp 171.809.000,00. Aset Lainnya BPKA mengalami penurunan sebesar (Rp 132.741.428.701,50) atau (74,42%) dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp 178.361.046.998,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.70
Rincian Aset Lainnya

No.	URAIAN	2024
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1	Sewa	38.947.241.285,00
2	Kerja Sama Pemanfaatan	7.709.270.000,00
3	Akumulasi Penyusutan Sewa	(1.830.791.827,48)
4	Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan	(7.216.727.142,90)
	JUMLAH (Rp)	**37.608.992.314,62**
	Aset Tidak Berwujud	
5	Software	257.406.000,00
6	Kajian	1.124.216.000,00
7	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.560.045.895,00
8	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-
	JUMLAH (Rp)	**6.941.667.895,00**
	Aset Lain-Lain	
9	Aset Rusak Berat/Usang	1.231.753.806,00
10	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(334.604.718,24)
	JUMLAH (Rp)	**897.149.087,76**
11	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	171.809.000,00
	JUMLAH (Rp)	**171.809.000,00**
	TOTAL (Rp) Aset Lainnya	**45.619.618.297,38**

- **Mutasi (bertambah) Aset Lainnya sebesar Rp 3.427.150.370,00 berasal dari:**
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 30.700.000,00
  - Mutasi masuk sebesar Rp 846.747.982,00 dengan rincian:
    - Mutasi masuk dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebesar Rp 1.124.216.000,00
    - Mutasi masuk dari Dinas Kebudayaan DIY sebesar Rp 358.612.000,00
  - Usulan Penghapusan atau reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp 1.913.622.370,00
- **Mutasi (berkurang) Aset Lainnya sebesar (Rp 139.077.623.321,00) berasal dari:**
  - Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar (Rp 1.185.599.221,00)
  - SK Penghapusan sebesar (Rp 926.555.964,00)
  - Gabung Aset sebesar (Rp 1.656.473.264,00)
  - Koreksi Kode Barang sebesar (Rp 141.738.272,00)
  - Koreksi BPK untuk Reklasifikasi dari Kemitraan dengan Pihak ketiga dan Tanah ke Properti Investasi Sebesar (Rp 135.167.256.600,00)
- **Mutasi (bertambah) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp 17.963.770.934,24) berasal dari:**
  - Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan Sewa sebesar (0,20)
  - Akumulasi Penyusutan Pindah Kode Barang Masuk sebesar (Rp 13.761.540.555,52)
  - Nilai/Beban Penyusutan sebesar (Rp 4.202.230.378,52)
- **Mutasi (berkurang) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp 47.669.279.183,74 berasal dari:**
  - Akumulasi Penyusutan Pindah Kode Barang Keluar sebesar Rp 13.591.439.886,21
  - Akumulasi Penyusutan Koreksi Salah Nilai Keluar sebesar Rp 48.183.328,43
  - Koreksi BPK untuk Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya ke Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp 34.029.655.969,10

3.1.4.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp 46.656.511.285,00 Rp 183.621.979.421,00

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 46.656.511.285,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 136.965.468.136,00) atau (74,59%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 183.621.979.421,00. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi Sewa sebesar Rp 38.947.241.285,00 dan Kerja Sama Pemanfaatan sebesar Rp 7.709.270.000,00.

Tabel III.71
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	URAIAN	2024	2023
1	Sewa	38.947.241.285,00	183.621.979.421,00
2	Kerja Sama Pemanfaatan	7.709.270.000,00	-
	JUMLAH (Rp) Netto	**46.656.511.285,00**	**183.621.979.421,00**

3.1.4.4.2. Aset Tidak Berwujud Rp 6.941.667.895,00 Rp 6.613.739.116,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tidak Berwujud adalah *software*, *website*, lisensi, *franchise*, hak cipta, paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, serta DED. Saldo Aset Tak Berwujud BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.941.667.895,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 327.928.779,00 atau 4,96% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 6.613.739.116,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.72
Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	URAIAN	2024	2023
1	Software	257.406.000,00	297.406.000,00
2	Kajian	1.124.216.000,00	-
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.560.045.895,00	6.316.333.116,00
JUMLAH (Rp)		**6.941.667.895,00**	**6.613.739.116,00**

3.1.4.4.3. Aset Lain-Lain Rp 1.231.753.806,00 Rp 244.687.400,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan akan dihapus dalam kondisi rusak berat. Saldo Aset Lain-Lain BPKA sebesar Rp 1.231.753.806,00 merupakan saldo akhir Aset Lain-Lain berupa Aset Rusak Berat/Usang yang memiliki saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang sebesar (Rp 334.604.718,24) sehingga nilai buku Aset Rusak Berat/Usang adalah sebesar Rp 897.149.087,76.

		2024	2023 *(audited)*
3.1.6.	**Kewajiban**	**Rp 46.945.778.298,74**	**Rp 9.124.387.040,85**

Kewajiban BPKA per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 46.945.778.298,74 merupakan Kewajiban Jangka Pendek berupa Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 3.596.516.965,74; Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 201.256.813,00; serta Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 43.148.004.520,00. Rincian kewajiban BPKA per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.73
Rincian Kewajiban per Unit Kerja

No.	URAIAN	2024	2023
1	Pendapatan Diterima Dimuka	3.596.516.965,74	7.248.812.569,85
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	201.256.813,00	210.736.006,00
3	Utang Belanja Bagi Hasil	43.148.004.520,00	1.664.838.465,00
JUMLAH (Rp)		**46.945.778.298,74**	**9.124.387.040,85**

3.1.6.1. Pendapatan Diterima Dimuka Rp 3.596.516.965,74 Rp 7.248.812.569,85

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2024 belum dikonsumsi/dimanfaatkan oleh pihak tersebut. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut berasal dari BPKA (induk) sebesar Rp 3.542.162.006,84; KPPD Bantul sebesar Rp 7.000.000,00; dan KPPD Kulon Progo sebesar Rp 47.354.958,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.74
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA (Induk)

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	
							Periode	Nilai
1	Tanah dan Bangunan	eks Pabrik Sabut Pengasih Kulon Progo	PT. Formula Land Jl. Dr. Sutomo No. 66 Yk	63/PERJ/SEKDA/XI/2024	01/09/2024 s/d 31/08/2025	124.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	82.553.424,66
							JUMLAH	**82.553.424,66**
2	Bangunan	eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD DIY	8/PERJ/GUB/VIII/2022	01/07/2022 s/d 30/06/2027 01/07/2022 s/d 30/06/2023 01/07/2023 s/d 30/06/2024 01/07/2024 s/d 30/06/2025 01/07/2025 s/d 30/06/2026 01/07/2026 s/d 30/06/2027	990.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00	01/01/2025 s/d 30/06/2025	98.186.301,37 198.000.000,00 198.000.000,00
							JUMLAH	**494.186.301,37**
3	Tanah	Dlaban, Sentolo, Kulon Progo	PT. Selo Adi Karto	5/PERJ/GUB/IX/2024	01/04/2024 s/d 31/3/2026 01/04/2024 s/d 31/03/2025 01/04/2025 s/d 31/03/2026	249.000.000,00 124.500.000,00 124.500.000,00	01/01/2025 s/d 31/03/2025	30.698.630,14 124.500.000,00
							JUMLAH	**155.198.630,14**
4	Tanah dan Bangunan	Eks Diklat Perindustrian, Malangan Ring Road Selatan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	00.10.7/8750	23/10/2024 s/d 22/10/2025	67.704.000,00	01/01/2025 s/d 22/10/2025	54.719.671,23
							JUMLAH	**54.719.671,23**
5	Tanah dan Bangunan	Eks PPK Kulon Progo, Wates	Koperasi Angkasa Pura I Avia	8/PERJ/SEKDA/III/2024	15/12/2023 s/d 14/12/2025 15/12/2023 s/d 14/12/2024 15/12/2024 s/d 14/12/2025	51.200.000,00 25.600.000,00 25.600.000,00	01/01/2025 sd 14/12/2025	24.407.671,23
							JUMLAH	**24.407.671,23**
6	Tanah	Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32 Yk	BUKP Gondokusuman	49/PR/SEKDA/VIII/2024	01/03/2024 s/d 28/02/2027 01/03/2024 s/d 28/02/2025 01/03/2025 s/d 28/02/2026 01/03/2026 s/d 28/02/2027	51.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00	01/01/2025 s/d 28/02/2025	2.747.945,21 17.000.000,00 17.000.000,00
							JUMLAH	**36.747.945,21**
7	Tanah dan Bangunan	Jalan Wisata Babarsari, Sleman	Yayasan Perguruan Dharma Pala Sleman	1/PERJ/SEKDA/I/2022 07/01/2022	20/11/2021 s/d 19/11/2026 20/11/2021 s/d 19/11/2022 20/11/2022 s/d 19/11/2023 20/11/2023 s/d 19/11/2024 20/11/2024 s/d 19/11/2025 20/11/2025 s/d 19/11/2026	45.200.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00	01/01/2025 s/d 19/11/2025	7.999.780,82 9.040.000,00
							JUMLAH	**17.039.780,82**
8	Tanah	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	16/PERJ/SEKDA/III/2024	28/03/2024 s/d 27/03/2025	17.970.000,00	01/01/2025 s/d 27/03/2025	4.234.027,40
							JUMLAH	**4.234.027,40**
9	Tanah	D.I. Panjaitan No. 66 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yk	dr. Soedarman	10/PERJ/GUB/VII/2023	03/09/2023 s/d 02/09/2028 03/09/2023 s/d 02/09/2024 03/09/2024 s/d 02/09/2025 03/09/2025 s/d 02/09/2026 03/09/2026 s/d 02/09/2027 03/09/2027 s/d 02/09/2028	188.125.000,00 37.625.000,00 37.625.000,00 37.625.000,00 37.625.000,00 37.625.000,00	01/01/2025 s/d 02/09/2025	25.255.136,99 37.625.000,00 37.625.000,00 37.625.000,00
							JUMLAH	**138.130.136,99**
10	Tanah	Jl. Perwakilan Wates	KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo	57/PERJ/SEKDA/X/2024	21/02/2024 s/d 20/02/2025	Rp7.332.000,00	01/01/2025 s/d 20/02/2025	1.024.471,23
							JUMLAH	**1.024.471,23**

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	
							Periode	Nilai
11	Tanah	Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Gapoktan Tirto Manunggal	66/PERJ/SEKDA/XI/2024	01/08/2024 s/d 31/07/2029	25.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/07/2025	2.904.109,59
					01/08/2024 s/d 31/07/2025	5.000.000,00		5.000.000,00
					01/08/2025 s/d 31/07/2026	5.000.000,00		5.000.000,00
					01/08/2026 s/d 31/07/2027	5.000.000,00		5.000.000,00
					01/08/2027 s/d 31/07/2028	5.000.000,00		5.000.000,00
					01/08/2028 s/d 31/07/2029	5.000.000,00		
							JUMLAH	**22.904.109,59**
12	Tanah	Kawasan Jogja Expo Center (JEC)	PT. Surya Abhinaya Sentosa	3/PERJ/GUB/V/2024	01/01/2024 s/d 31/12/2028	1.770.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	354.000.000,00
					01/01/2024 s/d 31/12/2024	354.000.000,00		354.000.000,00
					01/01/2025 s/d 31/12/2025	354.000.000,00		354.000.000,00
					01/01/2026 s/d 31/12/2026	354.000.000,00		354.000.000,00
					01/01/2027 s/d 31/12/2027	354.000.000,00		
					01/01/2028 s/d 31/12/2028	354.000.000,00		
							JUMLAH	**1.416.000.000,00**
13	Tanah	Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Pemerintah Kalurahan Widodomartani	27/PERJ/SEKDA/X/2021 11/10/2021	01/09/2021 s/d 31/08/2026	24.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	3.195.616,44
					01/09/2021 s/d 31/08/2022	4.800.000,00		4.800.000,00
					01/09/2022 s/d 31/08/2023	4.800.000,00		
					01/09/2023 s/d 31/08/2024	4.800.000,00		
					01/09/2024 s/d 31/08/2025	4.800.000,00		
					01/09/2025 s/d 31/08/2026	4.800.000,00		
							JUMLAH	**7.995.616,44**
14	Tanah	Jalan Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	PT. Daya Armada Nusantara	5/PERJ/GUB/IV/2022	25/03/2022 s/d 24/03/2027	143.500.000,00	01/01/2025 s/d 24/03/2025	6.526.301,37
					25/03/2022 s/d 24/03/2023	28.700.000,00		28.700.000,00
					25/03/2023 s/d 24/03/2024	28.700.000,00		28.700.000,00
					25/03/2024 s/d 24/03/2025	28.700.000,00		
					25/03/2025 s/d 24/03/2026	28.700.000,00		
					25/03/2026 s/d 24/03/2027	28.700.000,00		
							JUMLAH	**63.926.301,37**
15	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Tien Setiantoro	65/PERJ/SEKDA/XJ/2024	01/09/2024 s/d 31/08/2025	12.500.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	9.320.547,95
							JUMLAH	**9.320.547,95**
16	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Aris Purnomo	60/PERJ/SEKDA/XI/2022	01/09/2022 s/d 31/08/2025	6.300.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	1.398.082,19
					01/09/2022 s/d 31/08/2023	2.100.000,00		
					01/09/2023 s/d 31/08/2024	2.100.000,00		
					01/09/2024 s/d 31/08/2025	2.100.000,00		
							JUMLAH	**1.398.082,19**
17	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Sumartiningsih	61/PERJ/SEKDA/XI/2022	01/09/2022 s/d 31/08/2025	12.600.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	2.796.164,38
					01/09/2022 s/d 31/08/2023	4.200.000,00		
					01/09/2023 s/d 31/08/2024	4.200.000,00		
					01/09/2024 s/d 31/08/2025	4.200.000,00		
							JUMLAH	**2.796.164,38**
18	Tanah dan Bangunan	Mrican Baru,Caturtunggal, Depok, Sleman	Ir. Bambang Priambodo	9/PERJ/SEKDA/III/2024	01/01/2024 s/d 31/12/2025	80.200.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	40.100.000,00
					01/01/2024 s/d 31/12/2024	40.100.000,00		
					01/01/2025 s/d 31/12/2025	40.100.000,00		
							JUMLAH	**40.100.000,00**
19	Tanah dan Bangunan	Jl. Janti Km. 4 Komplek JEC (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	00.10.7/11010	01/01/2025 s/d 31/12/2025	350.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	350.000.000,00
							JUMLAH	**350.000.000,00**
20	Tanah	Sorok, Sumbermulyo	Muhyudi Prabowo	6/PERJ/SEKDA/II/2024	01/01/2024 s/d 31/12/2028	8.250.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	1.650.000,00
					01/01/2024 s/d 31/12/2024	1.650.000,00		1.650.000,00
					01/01/2025 s/d 31/12/2025	1.650.000,00		1.650.000,00
					01/01/2026 s/d 31/12/2026	1.650.000,00		1.650.000,00
					01/01/2027 s/d 31/12/2027	1.650.000,00		
					01/01/2028 s/d 31/12/2028	1.650.000,00		
							JUMLAH	**6.600.000,00**
21	Tanah dan Bangunan	Glugo, Panggungharjo, Sewon	Lembaga Advokasi Konsumen Rentan	65/PERJ/SEKDA/XJ/2024	01/09/2024 s/d 31/08/2025	6.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	3.994.520,55
							JUMLAH	**3.994.520,55**

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	
							Periode	Nilai
22	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Erselita Rachma Sari	20/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2025	3.500.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	1.150.684,93
							JUMLAH	**1.150.684,93**
23	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Sedioko	21/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	560.000	01/01/2025 s/d 30/04/2025	36.821,92
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	112.000		112.000
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	112.000		112.000
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	112.000		112.000
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	112.000		112.000
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	112.000		
							JUMLAH	**484.821,92**
24	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Sulistyaningsih	22/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	1.305.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	85.808,22
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	261.000,00		261.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	261.000,00		261.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	261.000,00		261.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	261.000,00		261.000,00
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	261.000,00		
							JUMLAH	**1.129.808,22**
25	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Tri Jalu Suryowaseso	23/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	1.580.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	103.890,41
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	316.000,00		316.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	316.000,00		316.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	316.000,00		316.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	316.000,00		316.000,00
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	316.000,00		
							JUMLAH	**1.367.890,41**
26	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Aries Nuzuli	24/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	895.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	58.849,32
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	179.000,00		179.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	179.000,00		179.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	179.000,00		179.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	179.000,00		179.000,00
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	179.000,00		
							JUMLAH	**774.849,32**
27	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Ir. Subur Raharjo	47/PERJ/SEKDA/VII/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	6.250.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	410.958,90
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	1.250.000,00		1.250.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	1.250.000,00		1.250.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	1.250.000,00		1.250.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	1.250.000,00		1.250.000,00
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	1.250.000,00		
							JUMLAH	**5.410.958,90**
28	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Ignatia Sumartinah	26/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	67.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	4.405,48
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	13.400,00		13.400,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	13.400,00		13.400,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	13.400,00		13.400,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	13.400,00		13.400,00
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	13.400,00		
							JUMLAH	**58.005,48**
29	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Sri Widiastuti	27/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	560.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	36.821,92
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	112.000,00		112.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	112.000,00		112.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	112.000,00		112.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	112.000,00		112.000,00
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	112.000,00		
							JUMLAH	**484.821,92**
30	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Yulianto Wibowo	28/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	560.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	36.821,92
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	112.000,00		112.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	112.000,00		112.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	112.000,00		112.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	112.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	112.000,00		
							JUMLAH	**484.821,92**

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	
							Periode	Nilai
31	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Sugiarto	29/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	140.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	9.205,48
								28.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	28.000,00		28.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	28.000,00		28.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	28.000,00		28.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	28.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	28.000,00		
							JUMLAH	**121.205,48**
32	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Suyatini	30/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	140.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	9.205,48
								28.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	28.000,00		28.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	28.000,00		28.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	28.000,00		28.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	28.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	28.000,00		
							JUMLAH	**121.205,48**
33	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	RL Mawarti Dwi Astuti DR.	31/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	1.150.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	75.616,44
								230.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	230.000,00		230.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	230.000,00		230.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	230.000,00		230.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	230.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	230.000,00		
							JUMLAH	**995.616,44**
34	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Supartini	32/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	535.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	35.178,08
								107.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	107.000,00		107.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	107.000,00		107.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	107.000,00		107.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	107.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	107.000,00		
							JUMLAH	**463.178,08**
35	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Bambang Setyo Pambudi	33/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	280.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	18.410,96
								56.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	56.000,00		56.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	56.000,00		56.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	56.000,00		56.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	56.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	56.000,00		
							JUMLAH	**242.410,96**
36	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Sigit Istiarto	34/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	195.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	12.821,92
								39.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	39.000,00		39.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	39.000,00		39.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	39.000,00		39.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	39.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	39.000,00		
							JUMLAH	**168.821,92**
37	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Toni Aris Munandar	35/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	195.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	12.821,92
								39.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	39.000,00		39.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	39.000,00		39.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	39.000,00		39.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	39.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	39.000,00		
							JUMLAH	**168.821,92**
38	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Wisnubroto	36/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	280.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	18.410,96
								56.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	56.000,00		56.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	56.000,00		56.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	56.000,00		56.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	56.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	56.000,00		
							JUMLAH	**242.410,96**
39	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Hari Murti	37/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	280.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	18.410,96
								56.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	56.000,00		56.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	56.000,00		56.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	56.000,00		56.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	56.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	56.000,00		
							JUMLAH	**242.410,96**

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	
							Periode	Nilai
40	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Bayu Muliawan	38/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	280.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	18.410,96
								56.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	56.000,00		56.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	56.000,00		56.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	56.000,00		56.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	56.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	56.000,00		
							JUMLAH	**242.410,96**
41	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Siti Dahliah	39/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	1.090.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	71.671,23
								218.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	218.000,00		218.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	218.000,00		218.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	218.000,00		218.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	218.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	218.000,00		
							JUMLAH	**943.671,23**
42	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Iwan Supriyadi	40/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	1.310.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	86.136,99
								262.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	262.000,00		262.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	262.000,00		262.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	262.000,00		262.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	262.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	262.000,00		
							JUMLAH	**1.134.136,99**
43	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Gunarto	41/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	1.345.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	88.438,36
								269.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	269.000,00		269.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	269.000,00		269.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	269.000,00		269.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	269.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	269.000,00		
							JUMLAH	**1.164.438,36**
44	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Dwi Ariyanto	42/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	1.695.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	111.452,05
								339.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	339.000,00		339.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	339.000,00		339.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	339.000,00		339.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	339.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	339.000,00		
							JUMLAH	**1.467.452,05**
45	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Anton Rudianto	25/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2024 s/d 30/04/2029	1.790.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	117.698,63
								358.000,00
					01/05/2024 s/d 30/04/2025	358.000,00		358.000,00
					01/05/2025 s/d 30/04/2026	358.000,00		358.000,00
					01/05/2026 s/d 30/04/2027	358.000,00		358.000,00
					01/05/2027 s/d 30/04/2028	358.000,00		
					01/05/2028 s/d 30/04/2029	358.000,00		
							JUMLAH	**1.473.698,63**
46	Tanah dan Bangunan	Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala Darma Saputra	68/PERJ/SEKDA/XII/2024	31/07/2024 s/d 30/07/2025	23.600.000,00	01/01/2025 s/d 30/07/2025	13.642.739,73
							JUMLAH	**13.642.739,73**
47	Tanah	Jalan Taman Siswa Nomor 103 Yogyakarta	PT. Yudhistira Mahadana Sampurna	00.10.7/10920	01/01/2025 s/d 31/12/2025	190.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	190.000.000,00
							JUMLAH	**190.000.000,00**
48	Tanah dan Bangunan	Randubelang no 40 2/8 Bangunharjo Sewon Bantul	Sigit Ariantawibawa	012/06197/PBD	01/09/2023 s/d 31/08/2025	2.858.400,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	951.494,79
					01/09/2023 s/d 31/08/2024	1.429.200,00		
					01/09/2024 s/d 31/08/2025	1.429.200,00		
							JUMLAH	**951.494,79**
49	Tanah dan Bangunan	Jl Bima 25 B Jurugentong Banguntapan Bantul	Ajie Mardana ST	012/05798/PBD	01/07/2023 s/d 30/06/2025	1.560.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	386.794,52
					01/07/2023 s/d 30/06/2024	780.000,00		
					01/07/2024 s/d 30/06/2025	780.000,00		
							JUMLAH	**386.794,52**
50	Tanah dan Bangunan	Jl Nyi Adisari 29 Yogyakarta	Heny Purnawati	00.10.7/3833	01/06/2024 s/d 31/05/2025	2.023.800,00	01/01/2025 s/d 31/05/2025	837.243,29
							JUMLAH	**837.243,29**
51	Tanah dan Bangunan	Komp Colombo 58 Sleman	Yuliana Hartati	00.10.7/5066	01/07/2024 s/d 30/06/2025	7.262.574,00	01/01/2025 s/d 30/06/2025	3.601.440,81
							JUMLAH	**3.601.440,81**

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	
							Periode	Nilai
52	Tanah dan Bangunan	Jl. Gedongan Baru I 7/42 B4 Pelemwulung Banguntapan Bantul	Hasan Khoiri AMD	00.10.7/4917	01/09/2024 s/d 31/08/2026 01/09/2024 s/d 31/08/2025 01/09/2025 s/d 31/08/2026	775.800,00 387.900,00 387.900,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	258.245,75 387.900,00
							JUMLAH	**646.145,75**
53	Tanah dan Bangunan	Jl. Sriti No.20 C Demangan Baru Depok Sleman	Bambang Hermanto	00.10.7/710	01/02/2024 s/d 31/01/2025	2.460.000,00	01/01/2025 s/d 31/01/2025	208.931,51
							JUMLAH	**208.931,51**
54	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Roos Ani	62/PERJ/SEKDA/XI/2022	01/09/2022 s/d 31/08/2025 01/09/2022 s/d 31/08/2023 01/09/2023 s/d 31/08/2024 01/09/2024 s/d 31/08/2025	8.190.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	1.817.506,85
							JUMLAH	**1.817.506,85**
55	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Hermawan	64/PERJ/SEKDA/XI/2024	01/09/2024 s/d 31/08/2025	3.500.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	2.330.136,99
							JUMLAH	**2.330.136,99**
56	Tanah dan Bangunan	Karangjati, Mlati, Sleman	Romi Sukma	00.10.7/11783	01/01/2025 s/d 31/12/2025	Rp4.750.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	4.750.000,00
							JUMLAH	**4.750.000,00**
57	Tanah dan Bangunan	Karangjati, Mlati, Sleman	PT. Avo Innovation Technology	13/PERJ/SEKDA/VI/2023	01/05/2023 s/d 30/04/2025 01/05/2023 s/d 30/04/2024 01/05/2024 s/d 30/04/2025	32.300.000,00 16.150.000,00 16.150.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	5.309.589,04
							JUMLAH	**5.309.589,04**
58	Tanah	Tambak Udang di Gadingsari, Sanden	YB Pratomo	10/PERJ/SEKDA/I/2022 31/01/2022	01/02/2022 s/d 31/01/2027 01/02/2022 s/d 31/01/2023 01/02/2023 s/d 31/01/2024 01/02/2024 s/d 31/01/2025 01/02/2025 s/d 31/01/2026 01/02/2026 s/d 31/01/2027	115.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/01/2025	1.953.424,66 23.000.000,00 23.000.000,00
							JUMLAH	**47.953.424,66**
59	Tanah	Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Widodo Mulyo	336/KEP/2022 21/11/2022	01/10/2022 s/d 30/09/2025 01/10/2022 s/d 30/09/2023 01/10/2023 s/d 30/09/2024 01/10/2024 s/d 30/09/2025	4.800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	1.196.712,33
							JUMLAH	**1.196.712,33**
60	Tanah dan Bangunan	Jalan D.I. Panjaitan No. 70, Mantrijeron, Suryodiningratan, Yk	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	11/PERJ/GUB/VII/2026	01/04/2021 s/d 30/09/2026 01/04/2021 s/d 30/09/2022 01/04/2022 s/d 30/09/2023 01/04/2023 s/d 30/09/2024 01/04/2024 s/d 30/09/2025 01/04/2025 s/d 30/09/2026	126.000.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	18.848.219,18 25.200.000,00
							JUMLAH	**44.048.219,18**
61	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Depri Priatna	9/PERJ/SEKDA/IV/2023	01/10/2022 s/d 30/09/2027 01/10/2022 s/d 30/09/2023 01/10/2023 s/d 30/09/2024 01/10/2024 s/d 30/09/2025 01/10/2025 s/d 30/09/2026 01/10/2026 s/d 30/09/2027	39.500.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	5.908.767,12 7.900.000,00 7.900.000,00
							JUMLAH	**21.708.767,12**
62	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Yani Suryani	00.10.7/10129	01/10/2024 s/d 30/09/2025	5.500.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	4.113.698,63
							JUMLAH	**4.113.698,63**
63	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Juju	24/PERJ/SEKDA/XI/2023	01/10/2024 s/d 30/09/2025	4.500.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	3.365.753,42
							JUMLAH	**3.365.753,42**

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	
							Periode	Nilai
64	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Zuljasrifon	8/PERJ/SEKDA/I/2022	01/10/2021 s/d 30/09/2026	22.500.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	3.365.753,42
								4.500.000,00
					01/10/2021 s/d 30/09/2022	4.500.000,00		
					01/10/2022 s/d 30/09/2023	4.500.000,00		
					01/10/2023 s/d 30/09/2024	4.500.000,00		
					01/10/2024 s/d 30/09/2025	4.500.000,00		
					01/10/2025 s/d 30/09/2026	4.500.000,00		
							JUMLAH	**7.865.753,42**
65	Tanah dan Bangunan	Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Sleman	Pemerintah Kalurahan Sumberagung	19/PERJ/SEKDA/IV/2022	01/03/2022 s/d 28/02/2027	31.725.000,00	01/01/2025 s/d 28/02/2025	1.025.630,14
								6.345.000,00
					01/03/2022 s/d 28/02/2023	6.345.000,00		6.345.000,00
					01/03/2023 s/d 28/02/2024	6.345.000,00		
					01/03/2024 s/d 28/02/2025	6.345.000,00		
					01/03/2025 s/d 28/02/2026	6.345.000,00		
					01/03/2026 s/d 28/02/2027	6.345.000,00		
							JUMLAH	**13.715.630,14**
66	Tanah dan Bangunan	Hargobinangun, Pakem, Sleman	PT. Anindya Mitra Internasional	3/PERJ/GUB/III/2023	27/03/2023 s/d 26/03/2028	320.000.000,00	01/01/2025 s/d 26/03/2025	14.904.109,59
								64.000.000,00
					27/03/2023 s/d 26/03/2024	64.000.000,00		64.000.000,00
					27/03/2024 s/d 26/03/2025	64.000.000,00		64.000.000,00
					27/03/2025 s/d 26/03/2026	64.000.000,00		
					27/03/2026 s/d 26/03/2027	64.000.000,00		
					27/03/2027 s/d 26/03/2028	64.000.000,00		
							JUMLAH	**206.904.109,59**
67	Tanah dan Bangunan	Jalan Raden Ronggo, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	BUKP Kemantren Kotagede	21/PERJ/SEKDA/VI/2022	01/04/2022 s/d 31/03/2025	30.300.000,00	01/01/2025 s/d 31/03/2025	2.490.410,96
					01/04/2022 s/d 31/03/2023	10.100.000,00		
					01/04/2023 s/d 31/03/2024	10.100.000,00		
					01/04/2024 s/d 31/03/2025	10.100.000,00		
							JUMLAH	**2.490.410,96**
68	Tanah dan Bangunan	Jalan Kusumanegara Nomor 168E	LP2Desaku	4/PERJ/SEKDA/I/2024	01/02/2023 s/d 31/01/2025	18.150.000,00	01/01/2025 s/d 31/01/2025	770.753,42
					01/02/2023 s/d 31/01/2024	9.075.000,00		
					01/02/2024 s/d 31/01/2025	9.075.000,00		
							JUMLAH	**770.753,42**
68	Tanah dan Bangunan	Jalan Sriti Nomor 20 G Caturtunggal	Lembaga Konsumen Yogyakarta	67/PERJ/SEKDA/IX/2024	01/06/2024 s/d 31/05/2027	12.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/05/2025	1.654.794,52
								4.000.000,00
					01/06/2024 s/d 31/05/2025	4.000.000,00		4.000.000,00
					01/06/2025 s/d 31/05/2026	4.000.000,00		
					01/06/2026 s/d 31/05/2027	4.000.000,00		
							JUMLAH	**9.654.794,52**
							PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	**3.542.162.006,84**

Tabel III.75
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka KPPD Bantul

No	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	
					Periode	Nilai
1	Pimpinan PT Bank BPD DIY Cabang Bantul	900/08376	01/01/2022 s/d 31/12/2026	17.500.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	3.500.000,00
						3.500.000,00
			01/01/2022 s/d 31/12/2022	3.500.000,00		
			01/01/2023 s/d 31/12/2023	3.500.000,00		
			01/01/2024 s/d 31/12/2024	3.500.000,00		
			01/01/2025 s/d 31/12/2025	3.500.000,00		
			01/01/2026 s/d 31/12/2026	3.500.000,00		
						7.000.000,00
					PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	**7.000.000,00**

Tabel III.76
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka KPPD Kulon Progo

No	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	
					Periode	Nilai
1	PT BRI (PERSERO) Tbk Cabang Wates (ATM)	B.2551 KC-VII/LYI/07/2024	01/08/2024 s/d 31/07/2025	3.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/07/2025	1.742.465,75
					JUMLAH	**1.742.465,75**
2	PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (ATM BPD)	934/6558	01/01/2022 s/d 31/12/2026 01/01/2022 s/d 31/12/2022 01/01/2023 s/d 31/12/2023 01/01/2024 s/d 31/12/2024 01/01/2025 s/d 31/12/2025 01/01/2022 s/d 31/12/2026	15.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	3.000.000,00 3.000.000,00
					JUMLAH	**6.000.000,00**
3	Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy)	00.1.4.1/1235	01/08/2024 s/d 31/07/2025	5.040.000,00	01/01/2025 s/d 31/07/2025	2.927.342,47
					JUMLAH	**2.927.342,47**
4	Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir)	00.1.4.1/1236	01/08/2024 s/d 31/07/2025	16.400.000,00	01/01/2025 s/d 31/07/2025	9.757.808,22
					JUMLAH	**9.757.808,22**
5	Painem (Kantin)	00.1.4.1/1234	01/08/2024 s/d 31/07/2025	5.040.000,00	01/01/2025 s/d 31/07/2025	2.927.342,47
					JUMLAH	**2.927.342,47**
6	PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD)	934/6558	01/01/2022 s/d 31/12/2026 01/01/2022 s/d 31/12/2022 01/01/2023 s/d 31/12/2023 01/01/2024 s/d 31/12/2024 01/01/2025 s/d 31/12/2025 01/01/2026 s/d 31/12/2026	60.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	12.000.000,00 12.000.000,00
					JUMLAH	**24.000.000,00**
					PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	**47.354.958,90**

2.1.06. Utang Belanja Rp 43.349.261.333,00 Rp 1.875.574.471,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp 43.349.261.333,00 merupakan beban BPKA atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2024 tetapi belum dibayarkan sebesar Rp 201.256.813,00 serta utang transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 43.148.004.520,00.

2.1.06.02 Utang Belanja Barang dan Jasa Rp 201.256.813,00 Rp 210.736.006,00

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp 201.256.813,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 9.479.193,00) atau (4,50%) dibandingkan dengan Utang Belanja Barang dan Jasa BPKA Tahun 2023 sebesar Rp 210.736.006,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.77
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per Unit Kerja

No.	UTANG BELANJA	BPKA (induk)	KPPD Kota	KPPD Bantul	KPPD KP	KPPD GK	KPPD SLEMAN	JUMLAH (Rp)
1	Tagihan Telepon	983.859,00	72.044,00	75.264,00	75.427,00	123.392,00	142.312,00	1.472.298,00
2	Tagihan Listrik	14.377.002,00	19.887.345,00	50.220.996,00	23.679.681,00	15.645.520,00	53.129.133,00	176.939.677,00
3	Tagihan Air	122.700,00	-	61.000,00	2.406.400,00	1.117.270,00	218.500,00	3.925.870,00
5	Kawat/Faksimili/Internet/TV	-	7.592.948,00	-	-	11.012.720,00	313.300,00	18.918.968,00
	JUMLAH (Rp)	**15.483.561,00**	**27.552.337,00**	**50.357.260,00**	**26.161.508,00**	**27.898.902,00**	**53.803.245,00**	**201.256.813,00**

2.1.06.03 Utang Belanja Bagi Hasil Rp 43.148.004.520,00 Rp 1.664.838.465,00

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2024 sebesar Rp 43.148.004.520,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 37.403.562.463,00 dan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebesar Rp 5.744.442.057,00. Utang Belanja Bagi Hasil memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel III.78
Rincian Utang Belanja Bagi Hasil

No.	URAIAN	2024
1	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Bantul	8.242.200.378,00
2	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Gunungkidul	5.451.370.968,00
3	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Kulon Progo	5.292.429.798,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Sleman	18.417.561.319,00
5	Utang Belanja Bagi Hasil Kota Yogyakarta	5.744.442.057,00
JUMLAH (Rp)		**43.148.004.520,00**

3.1.7. Ekuitas Rp 3.694.315.916.388,01 Rp 3.426.100.449.426,95

Saldo Ekuitas BPKA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.694.315.916.388,01 merupakan kekayaan bersih BPKA yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban BPKA pada tanggal 31 Desember 2024. Saldo Ekuitas BPKA per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 268.215.466.961,06 atau 7,83% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 3.426.100.449.426,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.79
Mutasi Ekuitas

No	Uraian	Jumlah
1	Ekuitas Awal	3.426.100.449.426,95
2	Surplus/Defisit – LO	4.263.226.984.204,62
3	RK PPKD	(4.042.467.067.852,95)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	47.455.550.609,39
	JUMLAH (Rp)	**3.694.315.916.388,01**

		2024	2023 (*audited*)
3.1.8.	**Pendapatan Daerah-LO**	**Rp 5.851.599.725.109,22**	**Rp 5.935.410.516.452,47**

Pendapatan Daerah-LO BPKA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 5.851.599.725.109,22 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp 2.333.407.938.729,22; Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp 3.508.682.988.702,00; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp 9.508.797.678,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.8.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO**	**Rp 2.333.407.938.729,22**	**Rp 2.335.666.690.628,90**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO BPKA Tahun 2024 sebesar Rp 2.333.407.938.729,22 meliputi Pajak Daerah-LO sebesar Rp 2.157.532.293.945,00; Retribusi Daerah-LO sebesar Rp 1.068.701.049,96; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp 66.372.413.217,67; dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp 108.434.530.516,59 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.8.1.1.	**Pajak Daerah-LO**	**Rp 2.157.532.293.945,00**	**Rp 2.069.606.143.000,57**

Pajak Daerah BPKA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 2.157.532.293.945,00. Pajak Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp 87.926.150.944,43 atau 4,25% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 2.069.606.143.000,57. Pajak Daerah-LO BPKA terdiri dari pendapatan pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dikurangi dengan piutang pajak yang sudah dibayarkan dengan rincian:

Tabel III.80
Rincian Pajak Daerah-LO

URAIAN	2024	2023
PAJAK DAERAH-LO		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	1.041.662.985.900,00	978.964.253.100,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	453.957.069.400,00	440.842.426.300,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	372.113.724.291,00	369.593.604.698,57
Pajak Air Permukaan-LO	806.104.996,00	612.386.532,00
Pajak Rokok-LO	288.962.709.258,00	279.593.472.370,00
Pajak Alat Berat-LO	29.700.100,00	-
JUMLAH (Rp)	**2.157.532.293.945,00**	**2.069.606.143.000,57**

Tidak terdapat penambahan maupun pembayaran piutang pajak selama Tahun Anggaran 2024 sehingga Pajak Daerah-LO mencerminkan nilai pendapatan pajak yang benar-benar disetorkan ke RKUD selama tahun berjalan.

3.1.8.1.2.	**Retribusi Daerah-LO**	**Rp 1.068.701.049,96**	**Rp 1.071.299.375,06**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO BPKA pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.068.701.049,96. Retribusi Daerah-LO BPKA pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp 2.598.325,10) atau (0,24%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 1.071.299.375,06. Retribusi Daerah-LO BPKA pada Tahun 2023 terdiri dari Retribusi Jasa Usaha yang telah diterima secara kas oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun 2024 dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp 1.030.316.927,00 ditambah dengan pembayaran Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp 92.739.081,86 dan dikurangi dengan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 sebesar (Rp 54.354.958,90) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.81
Rincian Retribusi Daerah-LO

URAIAN	2024	2023
RETRIBUSI DAERAH-LO		
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	7.162.365,02	581.257.284,71
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	-	140.600.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	31.221.757,94	349.442.090,35
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	150.740.000,00	-
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	879.576.927,00	-
JUMLAH (Rp)	**1.068.701.049,96**	**1.071.299.375,06**

3.1.8.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO **Rp 66.372.413.217,67** **Rp 168.468.204.425,61**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO BPKA Tahun 2024 adalah sebesar Rp 66.372.413.217,67. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar (Rp 102.095.791.207,94) atau (60,60%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 168.468.204.425,61. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO BPKA Tahun 2024 merupakan laba/rugi BUMD Tahun 2024 bagian Pemda DIY yang menambah investasi permanen yang diterima secara kas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.82
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2024
1	PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)	(22.354.688.924,40)
2	PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)	92.177.732.218,59
3	PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	5.044.536.762,12
4	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY (Metode Ekuitas)	(6.284.042.615,73)
5	PT. Asuransi Bangun Askrida (Metode Harga Perolehan)	-
6	Badan Usaha Kredit Pedesaan (Metode Ekuitas)	(2.211.124.222,91)
	Jumlah (Rp)	**66.372.413.217,67**

3.1.8.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO **Rp 108.434.530.516,59** **Rp 96.521.043.827,66**

Lain-Lain PAD yang Sah-LO BPKA Tahun 2024 adalah sebesar Rp 108.434.530.516,59. Lain-Lain PAD yang Sah BPKA Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.913.486.688,93 atau 12,34% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 96.521.043.827,66. Lain-Lain PAD yang Sah-LO BPKA Tahun 2024 terdiri dari Lain-lain PAD yang Sah-LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.83
Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO

URAIAN	2024	2023
LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LO		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	24.865.076,52	138.053.406,25
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	15.987.993.523,15	11.723.167.590,31
Jasa Giro-LO	7.953.419.673,00	5.917.546.866,77
Pendapatan Bunga-LO	16.371.213.210,00	18.901.735.590,58
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	-	7.000.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	-	51.540,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	735.407.168,00	821.835.137,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	61.431.097.950,00	54.430.782.050,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	36.388.533,00	42.859.740,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	-	182.984.070,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	5.894.145.382,92	4.284.027.836,75
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	-	71.000.000,00
TOTAL (Rp)	**108.434.530.516,59**	**96.521.043.827,66**

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp 24.865.076,52 merupakan:
  - Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO sebesar Rp 1,52 berasal dari hasil penjualan alat kantor lainnya sebesar Rp 1.116.208.800,00 dikurangi dengan surplus dan defisit penjualan alat kantor lainnya sebesar (Rp 1.116.208.798,48)
  - Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO sebesar Rp 1.873.760,00 berasal dari hasil penjualan atas bangunan gedung sebesar Rp 195.750.000,00 dikurangi dengan surplus dan defisit penjualan bangunan gedung sebesar (Rp 193.876.240,00)
  - Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO sebesar Rp 22.991.315,00 berasal dari penjualan hewan ternak sebesar Rp 205.205.500,00 dikurangi dengan surplus dan defisit penjualan hewan ternak sebesar (Rp 182.214.185,00)
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp 15.987.993.523,15 merupakan:
  - Hasil Sewa BMD-LO sebesar Rp 9.835.882.481,15 berasal dari Hasil Sewa BMD sebesar Rp 6.221.971.000,00 ditambah dengan pembayaran Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp 7.156.073.487,99 dan dikurangi dengan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan sebesar (Rp 3.542.162.006,84)
  - Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO sebesar 6.152.111.042,00 berasal dari Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Berupa Tanah Bangunan Hotel di Jl. Malioboro 52-58 Yogyakarta untuk masa perjanjian dari tahun 2024-2054
- Jasa Giro-LO sebesar Rp 7.953.419.673,00 merupakan:
  - Jasa Giro pada Kas Daerah-LO sebesar Rp 7.429.210.323,00
  - Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO sebesar Rp 523.469.676,00
  - Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO sebesar Rp 739.674,00
- Pendapatan Bunga-LO sebesar Rp 16.371.213.210,00 merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah DIY pada PT Bank BPD DIY sebesar Rp 16.067.522.830,00 ditambah remunerasi *Treasury Deposit Facility* Triwulan I Tahun Anggaran 2024 ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 303.690.380,00

- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp 735.407.168,00 merupakan pembayaran denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di berbagai OPD
- Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO sebesar Rp 61.431.097.950,00 terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO sebesar Rp 60.385.186.350,00 dan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB)-LO sebesar Rp 1.045.911.600,00. Selama Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat penambahan maupun pembayaran piutang denda pajak sehingga saldo Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO sesuai dengan pendapatan yang benar-benar disetorkan ke RKUD.
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO sebesar Rp 36.388.533,00 merupakan pembayaran denda atas pemanfaatan tanah kas desa dan rumah dinas
- Pendapatan dari Pengembalian-LO sebesar Rp 5.894.145.382,92 merupakan:
  - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp 300.000,00 berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas SMA Negeri 2 Bantul
  - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO sebesar Rp 2.335.246.936,00
  - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LO sebesar Rp 649.680,00
  - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO sebesar Rp 439.870.142,00
  - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO sebesar Rp 26.314.945,00
  - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO sebesar Rp 12.777.526,83
  - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD-LO sebesar Rp 3.069.594.276,09
  - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO sebesar Rp 9.391.877,00

3.1.8.2. <u>Pendapatan Transfer-LO</u> <u>Rp 3.508.682.988.702,00</u> <u>Rp 3.479.169.753.466,00

Pendapatan Transfer-LO BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.508.682.988.702,00 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak PPKD DIY yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2024 dan tidak perlu dibayar kembali oleh PPKD DIY kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.84
Rincian Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	2024	2023
PENDAPATAN TRANSFER-LO		**3.479.169.753.466,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO	**3.507.699.183.472,00**	**3.478.333.847.046,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	**2.099.451.814.040,00**	**2.024.731.882.822,00**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	87.562.321.000,00	121.328.549.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.337.180.068.000,00	1.267.622.165.192,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	156.735.319.268,00	134.151.614.382,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	517.974.105.772,00	501.629.554.248,00

URAIAN	2024	2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	**1.408.247.369.432,00**	**1.453.601.964.224,00**
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	80.876.155.000,00
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO	1.396.157.452.432,00	1.372.725.809.224,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	**983.805.230,00**	**835.906.420,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota-LO	983.805.230,00	835.906.420,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.507.699.183.472,00 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 3.534.495.647.472,00 ditambah dengan Pengakuan *Treasury Deposit Facility* dari Kementerian Keuangan RI yang ditransfer non tunai namun belum ditarik atau ditransfer ke RKUD sebesar Rp 171.809.000,00 dan dikurangi dengan realisasi transfer non tunai *Treasury Deposit Facility* TA 2023 ke RKUD sebesar (Rp 26.968.273.000,00).

3.1.8.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO **Rp 9.508.797.678,00** **Rp 120.574.072.357,57**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 9.508.797.678,00 merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang yang sudah menjadi hak PPKD DIY yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2024 dan tidak perlu dibayar kembali oleh PPKD DIY kepada pihak lain berupa pengakuan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.85
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

URAIAN	2024	2023
PENDAPATAN HIBAH-LO	**9.508.797.678,00**	**120.569.044.341,57**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	**1.423.354.678,00**	**110.812.786.711,57**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.423.354.678,00	110.812.786.711,57
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	**-**	**1.725.627.630,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-	1.725.627.630,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	**8.084.153.000,00**	**8.030.630.000,00**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	8.084.153.000,00	8.030.630.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	**1.290.000,00**	**-**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.290.000,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-LO	**-**	**5.028.016,00**
Pendapatan Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	-	5.028.016,00
Jumlah (Rp)	**9.508.797.678,00**	**120.574.072.357,57**

Pendapatan Hibah-LO pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp 9.508.797.678,00 meliputi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp 1.423.354.678,00; Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp 8.084.153.000,00; dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO sebesar Rp 1.290.000,00. Pendapatan Hibah-LO terdiri atas dua bentuk hibah, yaitu:

- Hibah uang sebesar Rp 8.084.153.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendapatan hibah dari Dealer Otomotif sebesar Rp 3.813.413.000,00
  - Pendapatan hibah dari Main Dealer sebesar Rp 24.000.000,00
  - Pendapatan hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp 4.246.740.000,00

- Hibah barang sebesar Rp 1.423.354.678,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendapatan hibah atas hibah masuk aset tetap dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebesar Rp 747.401.996,00
  - Pendapatan hibah atas hibah masuk aset tetap dari Balai Besar PJN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebesarRp 675.952.682,00

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO sebesar Rp 1.290.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari:

- Pembayaran piutang dan penambahan penyisihan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp 900.000,00
- Penambahan Dana Bergulir pada *Net Present Value* sebesar Rp 20.676.000,00
- Penambahan bunga dan denda Dana Bergulir sebesar Rp 390.000,00
- Koreksi BPK untuk penyesuaian nilai *netto* penyisihan Piutang Dana Bergulir sebesar (Rp 20.676.000,00).

3.1.8.4. <u>Surplus Non Operasional-LO</u> <u>Rp 1.251.894.139,48</u> <u>Rp 1.588.392.572,75</u>

Surplus Non Operasional-LO BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.251.894.139,48 merupakan surplus dari penjualan Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 358.499.999,24
- Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 sebesar Rp 110.409.216,00
- Penjualan Barang Milik Daerah berupa Tebangan Pohon dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan dan Paket Pelebaran Jalan menuju Standar Brosot-Toyan sebesar Rp 11.600.000,00
- Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 567.999.999,24
- Penjualan berupa 33 (tiga puluh tiga) unit Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Segmen Ngremang-Garongan sebesar Rp 68.000.000,00
- Penjualan berupa : 1) Bangunan Gedung Kantor Permanen (eks Gedung UPTD BPTTG Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY) di JL. AM Sangaji No. 41 Yogyakarta. 2) Bangunan Gedung Kantor (eks UPT Kulit-Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY) di Jl. Parangtritis Km 11, Manding, Sabdodadi, Kabupaten Bantul sebesar Rp 10.626.240,00
- Penjualan berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah sebesar Rp 16.300.000,00
- Penjualan berupa 25 Ekor Hewan Ternak Kambing/Domba pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebesar Rp 4.458.685,00
- Penjualan BMD berupa Peralatan Mesin dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 61.000.000,00
- Penjualan BMD berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon pada Unit Produksi Tambak UPTD BP3MBTP, RS Jiwa Grhasia, TPA Piyungan dan JJLS Segmen Ngremang-Garongan sebesar Rp 18.000.000,00
- Penjualan BMD berupa Sisa Tanah Galian pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah sebesar Rp 25.000.000,00

3.1.9. Beban Rp 1.578.926.502.631,11 Rp 1.610.400.817.655,99

Beban BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.578.926.502.631,11 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2024. Beban tersebut terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp 92.795.883.760,33; Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 13.214.077.853,96; Beban Transfer sebesar Rp 1.472.896.541.016,82; dan Beban Tidak Terduga sebesar Rp 20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.9.1. Beban Operasi Rp 92.795.883.760,33 Rp 136.686.090.128,87

Beban Operasi BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 92.795.883.760,33 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 80.614.113.785,00; Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 11.167.176.507,50; dan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp 1.014.593.467,83 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.9.1.1. Beban Pegawai Rp 80.614.113.785,00 Rp 81.428.952.462,00

Beban Pegawai BPKA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 80.614.113.785,00. Beban Pegawai BPKA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp 814.838.677,00) atau (1,00%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 81.428.952.462,00. Beban Pegawai BPKA Tahun Anggaran 2024 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.86
Rincian Beban Pegawai

URAIAN	2024	2023
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	18.438.622.450,00	18.187.573.314,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	9.481.431.335,00	9.386.627.800,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.694.060.000,00	53.854.751.348,00
Jumlah (Rp)	**91.951.687.793,33**	**81.428.952.462,00**

3.1.9.1.2. Beban Barang dan Jasa Rp 11.167.176.507,50 Rp 17.476.061.569,74

Beban Barang dan Jasa BPKA Tahun 2024 adalah sebesar Rp 11.167.176.507,50. Beban Barang dan Jasa BPKA Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp 6.308.885.062,24) atau (36,10%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 17.476.061.569,74. Beban Barang dan Jasa BPKA Tahun 2024 merupakan kenaikan manfaat ekonomis dalam periode tahun 2024 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.87
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	2024	2023
BEBAN BARANG DAN JASA		
Beban Barang		
Beban Barang Pakai Habis	4.442.894.984,90	5.660.595.167,84
Jumlah (Rp)	**4.442.894.984,90**	**5.660.595.167,84**

URAIAN	2024	2023
Beban Jasa		
Beban Jasa Kantor	12.143.111.287,00	13.078.702.740,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	570.019.728,71	971.072.348,37
Beban Sewa Tanah	11.298.000,00	10.760.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	329.103.837,00	439.947.135,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	235.947.930,18	311.955.116,40
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	45.000.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	107.250.000,00	130.020.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	99.300.600,00	99.644.700,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.731.503.792,00	1.502.893.480,00
Jumlah (Rp)	**15.227.535.174,89**	**16.589.995.519,77**
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.331.869.463,00	2.126.298.719,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(11.635.859.333,29)	(7.809.440.897,87)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.607.600,00	-
Jumlah (Rp)	**(9.274.382.270,29)**	**(5.683.142.178,87)**
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah	769.428.618,00	897.025.311,00
Jumlah (Rp)	**769.428.618,00**	**897.025.311,00**
Jumlah (Rp) Beban Barang dan Jasa	**11.167.176.507,50**	**17.476.061.569,74**

- **Beban Barang Pakai Habis**

  Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp 4.442.894.984,90 didapat dari pembebanan barang persediaan sebesar Rp 3.838.188.984,90 dikurangi reklasifikasi beban persediaan karena belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar (Rp 3.256.966,00) ditambah beban makanan dan minuman rapat dan aktivitas lapangan sebesar Rp 604.706.000,00.

- **Beban Jasa Kantor**

  Beban Jasa Kantor sebesar Rp 12.143.111.287,00 didapat dari Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 12.152.590.480,00 ditambah pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp 200.644.196,00 dikurangi pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar (Rp 210.736.006,00) dan ditambah koreksi BPK untuk penyesuaian Utang Belanja Jasa TA 2024 sebesar Rp 612.617,00.

- **Beban Iuran Jaminan/Asuransi**

  Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp 570.019.728,71 didapat dari Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 489.444.655,00 ditambah pembayaran Beban Dibayar Dimuka BPKA (induk) tahun 2023 sebesar Rp 351.445.814,29 serta dikurangi pengakuan Beban Dibayar Dimuka BPKA (induk) tahun 2024 sebesar (Rp 270.870.740,58) berupa asuransi gempa bumi, kebakaran, dan kendaraan.

- **Beban Sewa Tanah**

  Beban Sewa Tanah sebesar Rp 11.298.000,00 merupakan beban penyewaan tanah kas Desa Bangunharjo untuk Samsat Sewon sesuai dengan Perjanjian No P/400.10.2.4/267 dan No 900/3102 selama Tahun Anggaran 2024.

- **Beban Sewa Peralatan dan Mesin**
  Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 329.103.837,00 merupakan beban penyewaan berbagai peralatan dan mesin selama Tahun Anggaran 2024. Peralatan dan mesin yang disewa antara lain adalah kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp 153.730.000,00; alat penyimpan perlengkapan kantor sebesar Rp 19.314.000,00; alat kantor lainnya sebesar Rp 11.558.462,00; dan alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp 144.501.375,00.

- **Beban Sewa Gedung dan Bangunan**
  Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 235.947.930,18 didapat dari Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 242.450.000,00 ditambah pembayaran Beban Dibayar Dimuka KPPD Kulon Progo dan KPPD Bantul tahun 2023 sebesar Rp 19.617.486,34 serta dikurangi pengakuan Beban Dibayar Dimuka KPPD Kulon Progo dan KPPD Bantul tahun berjalan sebesar (Rp 26.119.556,16) berupa sewa bangunan Gedung untuk Samsat Desa Palihan, Samsat Desa Argomulyo, dan Samsat Desa Sidomulyo.

- **Beban Sewa Aset Tetap Lainnya**
  Beban Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 107.250.000,00 merupakan beban penyewaan sewa tanaman selama Tahun Anggaran 2024. Beban sewa aset tetap lainnya merupakan beban atas pembayaran sewa tanaman di BPKA DIY selama tahun anggaran 2024.

- **Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**
  Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp 99.300.600,00 merupakan beban atas kajian estimasi nilai lahan dan bangunan yang dilakukan atas pemanfaatan BMD eks Hotel Mutiara II di Jalan Malioboro Yogyakarta berdasarkan SPK Nomor 00.10.7/9651 selama tahun berjalan.

- **Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi**
  Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp 1.731.503.792,00 merupakan beban atas konsultansi bidang telematika sebesar Rp 265.760.542,00; konsultansi bidang keuangan sebesar Rp 1.375.999.750,00; dan konsultansi layanan jasa survei sebesar Rp 89.743.500,00.

- **Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**
  Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.331.869.463,00 didapat dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.399.370.695,00 dikurangi reklasifikasi belanja pemeliharaan ke persediaan sebesar (Rp 67.501.232,00).

- **Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah**
  Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp 769.428.618,00 merupakan beban atas perjalanan dinas dalam daerah selama tahun berjalan.

- **Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**
  Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp 11.635.859.333,29) merupakan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 549.486.353,00 dikurangi beban atas kapitalisasi aset tetap dari belanja barang dan jasa sebesar Rp 34.059.018,00 dan dikurangi beban atas defisit penjualan Barang Milik Daerah sebesar (Rp 12.151.286.668,29). Saldo Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan menunjukkan angka negatif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset diakibatkan adanya pembebanan atas defisit penjualan BMD yang tidak bisa dilawankan dengan Ekuitas, sehingga dibebankan ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Namun, secara perhitungan pemda, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tidak menunjukkan saldo negatif.

3.1.9.1.4. Beban Hibah Rp 0,00 Rp 37.740.646.172,07

BPKA tidak mengakui adanya Beban Hibah per 31 Desember 2024 dikarenakan tidak terdapat penghapusan aset tetap dengan mekanisme hibah keluar berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan kemudian dihibahkan kepada pihak eksternal.

3.1.9.1.6. Beban Penyisihan Piutang Rp 1.014.593.467,83 Rp 40.429.925,06

Beban Penyisihan Piutang BPKA Tahun 2024 sebesar Rp 1.014.593.467,83 merupakan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp 609.750,00; ditambah Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 17.589.885,83; dan ditambah Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 152.810.482,00 yang ditambah Koreksi BPK untuk penyesuaian investasi non permanen/dana bergulir karena kesalahan pengklasifikasian penyisihan piutang dana bergulir sebesar Rp 843.583.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.88
Rincian Beban Penyisihan Piutang

URAIAN	2024	2023
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG		
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	**609.750,00**	**5.000,00**
Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	609.750,00	5.000,00
Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**17.589.885,83**	**925.783,46**
Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	17.589.885,83	925.783,46
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**996.393.832,00**	**39.499.141,60**
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	2.100.000,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	293.200,00	271.300,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	996.100.632,00	37.127.841,60
Jumlah (Rp)	**1.014.593.467,83**	**40.429.925,06**

3.1.9.2. Beban Penyusutan Rp 13.214.077.853,96 Rp 23.979.529.339,91

Beban Penyusutan BPKA sebesar Rp 13.214.077.853,96 merupakan pengakuan atas pemanfaatan aset tetap dan aset lainnya yang terjadi selama Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.89
Rincian Beban Penyusutan

URAIAN	2024	2023
BEBAN PENYUSUTAN		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.130.429.022,35	12.678.491.513,82
Beban Penyusutan Alat Besar	957.744.380,19	1.240.039.742,95
Beban Penyusutan Alat Angkutan	271.729.285,72	7.853.114.021,12
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	162.047.455,00	116.981.185,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	145.364.562,50	12.172.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.223.110.738,23	1.960.855.905,80
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	152.269.295,84	269.857.728,53

Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.967.760,00	12.013.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	80.233.381,76	74.188.291,76
Beban Penyusutan	826.500,00	-
Beban Penyusutan Komputer	1.003.226.983,11	1.139.269.638,66
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	121.137.110,00	-
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	771.570,00	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**3.330.815.912,73**	**3.199.525.151,12**
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	3.278.633.186,97	3.138.696.574,74
Beban Penyusutan Monumen	7.155.613,80	21.223.095,00
Beban Penyusutan Menara	2.272.500,00	606.000,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	42.754.611,96	38.999.481,38
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**1.550.602.540,36**	**3.268.555.336,25**
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.362.625.698,72	1.855.011.093,60
Beban Penyusutan Bangunan Air	70.193.305,96	1.239.870.474,99
Beban Penyusutan Instalasi	27.896.345,64	27.896.345,64
Beban Penyusutan Jaringan	89.887.190,04	145.777.422,02
Beban Penyusutan Aset Lainnya	**4.202.230.378,52**	**4.832.957.338,72**
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	4.202.230.378,52	4.832.957.338,72
Jumlah (Rp)	**13.214.077.853,96**	**23.979.529.339,91**

3.1.9.4. Beban Transfer Rp 1.472.896.541.016,82 Rp 1.449.536.710.919,21

Beban Transfer BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.472.896.541.016,82 terdiri atas Beban Bagi Hasil sebesar Rp 911.842.572.564,00 dan Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp 561.053.968.452,82. Beban Bagi Hasil sebesar Rp 911.842.572.564,00 didapat dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 870.359.406.509,00 ditambah pengakuan utang belanja bagi hasil atas kurang bayar pajak daerah TA 2024 sebesar Rp 43.148.004.520,00 dikurangi pembayaran utang belanja bagi hasil atas kurang bayar pajak daerah TA 2023 sebesar (Rp 1.664.838.465,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.90
Rincian Beban Transfer

URAIAN	2024	2023
BEBAN TRANSFER		
Beban Bagi Hasil	**911.842.572.564,00**	**880.433.811.574,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	755.824.138.849,00	728.439.291.583,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	156.018.433.715,00	151.994.519.991,00
Beban Bantuan Keuangan	**561.053.968.452,82**	**569.102.899.345,21**
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	428.964.512.711,77	432.033.573.508,53
Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	132.089.455.741,05	137.069.325.836,68
Jumlah (Rp)	**1.472.896.541.016,82**	**1.449.536.710.919,21**

3.1.9.5. Beban Tidak Terduga Rp 20.000.000,00 Rp 198.487.268,00

Beban Tak Terduga BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 20.000.000,00 didapat dari Belanja Tidak Terduga untuk belanja sosial yang tidak direncanakan bagi korban bencana hidrometeorologi atas nama Ibu Nuraeni yang dirawat di RS Panti Rapih Yogyakarta.

3.1.9.6. Defisit Non Operasional-LO (Rp 10.698.132.412,97) (Rp 6.299.610.148,87)

Defisit Non Operasional-LO BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 10.698.132.412,97 merupakan defisit dari penjualan Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Penjualan berupa Kendaraan Bus sebanyak 16 Unit sebesar (4.603.554.222,08)
- Penjualan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPPTG) Unit Fasilitasi Kemasan yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto KM 8,5 Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab Sleman D.I. Yogyakarta sebesar (Rp 68.338.371,00)
- Penjualan berupa Kendaraan Bus sebanyak 9 Unit sebesar (Rp 2.349.289.999,92)
- Penjualan berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemda DIY sebesar (Rp 1.690.250,00)
- Penjualan berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar (Rp 22.258.636,94)
- Penjualan berupa Gedung dan Bangunan pada Unit PelaksanaTeknis Daerah Balai Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di Komplek Taman Hutan Raya Bunder, Playen, Gunungkidul sebesar (Rp 3.200.745.738,02)
- Penjualan berupa Hewan Ternak Sapi pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan, dengan rincia : 1) Sapi Perah sebanyak 4 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY; 2) Sapi Bull sebanyak 2 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY; 3) Sapi Potong sebanyak 3 ekor, berlokasi di Ngentak, Sumberagung, Kec. Jetis, Kabupaten Bantul sebesar (Rp 59.367.183,33)
- Pemusnahan BMD berupa Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran, dan Aset Tak Berwujud berupa Kajian sebesar (Rp 4.949.967,00)

3.1.9.7. Surplus/Defisit LO Rp 4.263.226.984.204,62 Rp 4.320.298.481.220,36

Surplus/Defisit LO sebesar Rp 4.263.226.984.204,62 berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp 5.851.599.725.109,22 dikurangi Beban-LO sebesar (Rp 1.578.926.502.631,11) ditambah dengan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 1.251.894.139,48 dikurangi Defisit Non Operasional-LO sebesar (Rp 10.698.132.412,97). Surplus/Defisit LO BPKA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp 57.071.497.015,74) atau (1,32%) dari tahun 2023 sebesar Rp 4.320.298.481.220,36.

3.1.9.8. Laporan Perubahan Ekuitas Rp 3.694.315.916.388,01 Rp 3.426.100.449.426,95

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas BPKA Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.91
Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2024	2023
Ekuitas Awal	3.426.100.449.426,95	3.387.355.288.460,40
Surplus/Defisit LO	4.263.226.984.204,62	4.320.298.481.220,36
RK PPKD	(4.042.467.067.852,95)	(4.045.976.369.244,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	47.455.550.609,39	(235.576.951.009,81)
Ekuitas Akhir	3.694.315.916.388,01	3.426.100.449.426,95

3.1.9.8.1. Ekuitas Awal Rp 3.426.100.449.426,95 Rp 3.387.355.288.460,40

Ekuitas Awal BPKA Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 38.745.160.966,55 atau 1,14% dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.387.355.288.460,40.

3.1.9.8.2. Surplus/Defisit LO Rp 4.263.226.984.204,62 Rp 4.320.298.481.220,36

Surplus/Defisit LO BPKA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp 57.071.497.015,74) atau (1,32%) dari tahun 2023 sebesar Rp 4.320.298.481.220,36.

3.1.9.8.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp 47.455.550.609,39 (Rp 235.576.951.009,81)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 47.455.550.609,39 merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 283.032.501.619,20 dikarenakan lebih banyak transaksi yang menambah Ekuitas dibandingkan dengan yang mengurangi Ekuitas.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BPKA

Terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) dimulai dari Dinas Keuangan padatahun 1974 s/d 1975, selanjutnya menjadi Direktorat Keuangan pada tahun 1975 s/d 1976. Kemudian berubah nama menjadi Biro Keuangan sampai tahun 1984, selanjutnya Biro Keuangan dari tahun 1997 s/d 2001 dan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dari tahun 2004 s/d 14 Februari 2009, pada saat itu BPKD merupakan penggabungan dari Biro Keuangan, Dispenda dan Bidang Aset Bapekoinda Provinsi DIY. Kemudian namanya berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi IY sejak 15 Februari tahun 2009 s.d tahun 2018 dan saat ini menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA).

Sejarah terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY adalah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 huruf (a) yang menyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu)sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

Struktur Organisasi BPKA adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
   a. Subbagian Umum
   b. Kelompok Substansi Program
   c. Kelompok Substansi Keuangan
3. Bidang Anggaran Pendapatan
   a. Subbidang Pajak Daerah
   b. Subbidang Retribusi Daerah
   c. Kelompok Substansi Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer
4. Bidang Anggaran Belanja
   a. Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan
   b. Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian
   c. Kelompok Substansi Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana
   d. Kelompok Substansi Anggaran Belanja Sosial Budaya
5. Bidang Pengelola Kas Daerah
   a. Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan
   b. Subbidang Pengelola Kas Perekonomian
   c. Kelompok Substansi Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana
   d. Kelompok Substansi Pengelola Kas Sosial Budaya
6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah
   a. Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
   b. Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah
   c. Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah

7. Bidang Akuntansi
   a. Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan
   b. Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian
   c. Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana
   d. Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya
8. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
   a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
   b. Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
   c. Kelompok Substansi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
9. Unit Pelaksana Teknis
10. Jabatan Fungsional.

Visi BPKA adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset terbaik se-Indonesia dengan misinya adalah sebagai :

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah
2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD
4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan profesionalisme SDM

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah dan akuntansi
2. Pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan
3. Melaksanakan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang milik daerah

Sedangkan fungsi BPKA adalah:

1. Penyusunan rencana kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
3. Pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain serta pendapatan transfer;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
8. Pengelolaan barang milik daerah;
9. Pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
11. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

12. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
14. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

BAB V
PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Audited) Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil konsolidasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran dengan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran) dan disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Untuk penyajian persediaan dan aset tetap di Neraca didukung dengan SIM Persediaan dan SIM ASET milik Pemerintah Daerah Provinsi DIY.

Perencanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc.
NIP.